# PPAS

## PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA CIMAHI

## TAHUN ANGGARAN 2025

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA CIMAHI**

**NOMOR** 900 / 35 - NK / 2024
170 / 10 / NK / VIII / 2024

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

**KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. H. DICKY SAROMI M.Sc.**
   Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi
   Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
   Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati
   Cihanjuang, Cimahi

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : **Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
      Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
      Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

   b. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
      Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
      Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

   c. Nama : **PURWANTO, S.Pd.**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
      Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
      Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

   d. Nama : **H. EDI KANEDI, S.E., M.M.Pd.**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
      Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
      Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025, perlu disusun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi yang disepakati bersama antara DPRD Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025.

Cimahi, 7 Agustus 2024

**Pj. WALI KOTA CIMAHI**

**selaku,**

**PIHAK PERTAMA**

**Dr. Ir. H. DICKY SAROMI M.Sc.**

**PIMPINAN**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KOTA CIMAHI**

**selaku,**

**PIHAK KEDUA**

**Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
**KETUA**

**H. BAMBANG PURNOMO**
**WAKIL KETUA**

**PURWANTO, S.Pd.**
**WAKIL KETUA**

**H. EDI KANEDI, S.E., M.M.Pd.**
**WAKIL KETUA**

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI NOMOR $\frac{900/35-NK/2024}{170/10/NK/VIII/2024}$ TAHUN 2024
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2025

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Angggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Kota Cimahi sebagai daerah otonom mempunyai hak, wewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran dan fungsi utama desentralisasi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Cimahi dalam pembangunan daerah adalah untuk melaksanakan tugas pokok pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan keuangan sebagai salah satu sumber daya pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, telah menjadi landasan konstitusional sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan implementasi pembangunan. Undang-undang ini pada prinsipnya misi utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Kebijakan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, maka perlu dukungan penganggarannya. Dokumen kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

## 1.2. TUJUAN

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Cimahi Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kota Cimahi dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, dengan tujuan terpenuhinya skala dan lingkungan kebutuhan masyarakat, yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian, serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.

## 1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
19. Peaturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 139);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 745, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 225).

# BAB II
# RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap tahunnya diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien, selain itu untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dalam mengefisienkan penggunaannya.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah, terbatasnya sumber-sumber

penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional dan akuntabel pada posisi yang amat penting untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Kemampuan Fiskal bersumber dari pendapatan daerah yang dapat dipantau dan dikendalikan secara lebih baik adalah pendapatan yang bersumber dari PAD. Sementara pendapatan transfer yang berupa dana bagi hasil khususnya sumber-sumber dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang melihat kecenderungan alokasi tahun anggaran sebelumnya khususnya untuk bagi hasil. Adapun sumber-sumber dana yang sifatnya earmark seperti Dana Alokasi Khusus belum dimasukan ke dalam proyeksi target pendapatan.

Adapun untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari estimasi SILPA atas tahun 2025 yang dapat digunakan di Tahun 2025 sebesar Rp78.640.240.094,00 yang berarti nilai belanja tahun 2024 murni akan terealisasi hanya 94,70% dan pendapatan murni terealisasi 100%.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, rencana pendapatan daerah Tahun 2025 diperkirakan sebesar **Rp1.409.813.559.977,-** . Sementara itu, untuk penerimaan pembiayaan daerah diprediksi sebesar **Rp78.640.240.094,-** yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan.

**Tabel 2.1**
**Proyeksi Penerimaan Tahun 2025**

| URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 2025 | DASAR HUKUM |
|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | | |
| **Pendapatan Asli Daerah** | **522,195,542,897** | |
| Pajak daerah | 314,135,093,659 | |
| Retribusi daerah | 187,481,122,785 | |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 11,627,628,409 | |
| Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 8,951,698,044 | |
| | | |
| **Pendapatan Transfer** | **887,618,017,080** | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | **821,123,211,000** | |
| Transfer antar daerah | **66,494,796,080.00** | |
| | | |
| **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah** | **0.00** | |
| | | |
| **JUMLAH PENDAPATAN DAERAH** | **1.409.813.559.977** | |

| URAIAN | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 2025 | DASAR HUKUM |
|---|---|---|
| | | |
| **Penerimaan Pembiayaan** | **78.640.240.094.00** | |
| SiLPA | 78,640,240,094,00 | |
| Pencairan Dana Cadangan | - | |
| Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | - | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 0.00 | |
| Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah | - | |
| Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan. | - | |
| | | |
| **JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **78.640.240.094.00** | |
| | | |
| **JUMLAH PENERIMAAN DAERAH** | **1.488.453.800.071,00** | |

*Sumber: BPKAD (Diolah)*

# BAB III
# PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain, tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah.

Dalam prioritas, skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dimaksud adalah kegiatan utama yang dominan sudah ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD. Rincian kegiatan utama yang lebih operasional direncanakan dan diusulkan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mekanisme RKA-PD yang dilaksanakan pada tahap setelah penetapan prioritas program dan plafon anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Rancangan PPAS disusun dengan tahapan untuk memastikan bahwa penyusunan PPAS harus memperhatikan sinergitas antara program pembangunan daerah dengan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Provinsi. Adapun tahapan penyusunan Rancangan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai dengan tahapan tersebut, sebelum menyusun Prioritas Belanja Daerah maka harus ditentukan terlebih dahulu Prioritas dari Pembangunan Daerah. Adapun Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Kota Cimahi Tahun 2025 disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi Kota Cimahi pada Tahun 2025, yaitu :

1. Menjaga Ketahanan Pangan Daerah
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat
4. Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Ekonomi dan Produk Lokal
5. Peningkatan Pendapatan Daerah
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga dan Sarana Prasarana pendukung layanan kesehatan
7. Percepatan Penurunan Stunting
8. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
9. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Mayarakat Miskin dan Rentan.
10. Pengembangan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik
11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan
12. Optimalisasi pemanfaatan ruang
13. Pemenuhan kualitas dan kuantitas air
14. Pengelolaan sampah perkotaan
15. Penyediaan infrastruktur yang ramah kelompok rentan
16. Optimalisasi pengelolaan bencana
17. Peningkatan penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Dari Prioritas Pembangunan Daerah yang telah ditentukan maka akan ditentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional serta disinkronkan juga dengan prioritas dan program provinsi.

## 1.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam menentukan prioritas pembangunan, pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional. Tiga pilar yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2025- 2029 untuk mencapai tujuan nasional yaitu : (1) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi; (2) Penguatan Well-Being; (3) Penguatan Kovergesi Antar Daerah; . Tema pembangunan yang diusung dalam RPJMN ini adalah "Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. Adapun 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dimaksud, meliputi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berdasarkan prioritas di atas, disusun sinergitas program pembangunan daerah Kota Cimahi terhadap Prioritas Nasional dalam Tabel 3.1. di bawah ini:

**Tabel 3.1**
**Sinergitas Program Pemerintah Daerah Kota Cimahi terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia | 11. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Independen dan Kesetaraan | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 02. Peningkatan Iklim Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja | Indeks Gini Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Indeks Gini Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Indeks Gini Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 03. Peningkatan Daya Beli Masyarakat | Tingkat Kemiskinan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | 04. Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Ekonomi dan Produk Lokal | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Pengangguran Terbuka (TPT) | |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | 05. Peningkatan Pendapatan Daerah | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Hidup dan Infrastruktur | |
| | 07. Percepatan Penurunan Stunting | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 09. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan. | Indeks Gini Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Tenaga Kerja |
| | 11. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Independen dan Kesetaraan | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Pendidikan |
| | 12. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Pendidikan |
| | 15. Penyediaan Infrastruktur yang Ramah Kelompok Rentan | Tingkat Kemiskinan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 16. Optimalisasi Pengelolaan Bencana | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 01. Menjaga Ketahanan Pangan Daerah | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | 06. Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga dan Sarana Prasarana Pendukung Layanan Kesehatan | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Indeks Pengetahuan | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Pengetahuan | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Pengetahuan | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Pengetahuan | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | 09. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan. | Indeks Kesehatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pengetahuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Kesehatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pengetahuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Kesehatan Indeks Pemberdayaan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Gender (IDG) Indeks Pengetahuan | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Kesehatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pengetahuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 10. Pengembangan Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik | Indeks Pengetahuan | Dinas Arsip Daerah |
| | 11. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Independen dan Kesetaraan | Tingkat Partisipasi Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 13. Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Air | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perhubungan |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas | 02. Peningkatan Iklim Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | 03. Peningkatan Daya Beli Masyarakat | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 04. Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Ekonomi dan Produk Lokal | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Tingkat Partisipasi Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | | Keluarga Berencana |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | 05. Peningkatan Pendapatan Daerah | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 06. Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga dan Sarana Prasarana Pendukung Layanan Kesehatan | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| | 07. Percepatan Penurunan Stunting | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | 08. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Tingkat Partisipasi Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Kesehatan<br>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)<br>Indeks Pengetahuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Tenaga Kerja |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Kesehatan<br>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)<br>Indeks Pengetahuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | 09. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan. | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Tenaga Kerja |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | 10. Pengembangan Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| | 11. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Independen dan Kesetaraan | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Pendidikan |
| 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 01. Menjaga Ketahanan Pangan Daerah | Tingkat Kemiskinan | Dinas Sosial |
| | | Indeks Resiko Bencana | Dinas Sosial |
| | | Tingkat Kemiskinan | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Indeks Gini Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Arsip Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Inspektorat |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Hidup dan Infrastruktur | |
| | | Tingkat Kemiskinan | Dinas Sosial |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Inspektorat |
| | | Tingkat Kemiskinan | Dinas Sosial |
| | 13. Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Air | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 14. Pengelolaan Sampah Perkotaan | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 16. Optimalisasi Pengelolaan Bencana | Indeks Resiko Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | 03. Peningkatan Daya Beli Masyarakat | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | 05. Peningkatan Pendapatan Daerah | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Dinas Pendidikan |
| | 09. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan. | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| | 10. Pengembangan Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Dinas Pendidikan |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 11. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Independen dan Kesetaraan | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Dinas Pendidikan |
| | 17. Peningkatan Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur | 04. Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Ekonomi dan Produk Lokal | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat | Dinas Pangan dan Pertanian |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Pengangguran Terbuka (TPT) | |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 09. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan. | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | 11. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Independen dan Kesetaraan | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 12. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 17. Peningkatan Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Kecamatan Cimahi Utara |

*Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2025, BPKAD (Diolah)*

## 1.2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Selain memperhatikan Prioritas Nasional, penyusunan PPAS juga harus memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dengan prioritas pemerintah provinsi. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan isu strategis dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2024-2026, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2025 sangat erat. Berdasarkan isu strategis tahun 2025, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat fokus untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan dan memasukkan ke dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya
2. Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
6. Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitasi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan

Dari Prioritas dan Arah Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat disusun sinkronisasi dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**
**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat**
**Tahun 2025**

| PROVINSI | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| 1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya | 01. Menjaga Ketahanan Pangan Daerah | Tingkat Kemiskinan | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | 02. Peningkatan Iklim Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | 03. Peningkatan Daya Beli Masyarakat | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |

| PROVINSI | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | 04. Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Ekonomi dan Produk Lokal | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Tingkat Partisipasi Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |

| PROVINSI | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2. Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama | 08. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan | Indeks Kesehatan | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pendidikan |
| | 10. Pengembangan Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik | Indeks Kesehatan | Dinas Arsip Daerah |
| 3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah | 06. Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga dan Sarana Prasarana Pendukung Layanan Kesehatan | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | 07. Percepatan Penurunan Stunting | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |

| PROVINSI | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | 09. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan. | Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana | 09. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan. | Indeks Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Tingkat Partisipasi Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Tingkat Kemiskinan | Dinas Sosial |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Resiko Bencana | Dinas Sosial |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| PROVINSI | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Tingkat Kemiskinan | Dinas Sosial |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Tingkat Kemiskinan | Dinas Sosial |
| | 11. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Independen dan Kesetaraan | Tingkat Partisipasi Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| PROVINSI | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Tingkat Partisipasi Masyarakat | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Indeks Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi Opini BPK | Dinas Pendidikan |
| | 16. Optimalisasi Pengelolaan Bencana | Indeks Resiko Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta | 12. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |

| PROVINSI | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| Gerakan Membangun Desa | | | |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 13. Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Air | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 14. Pengelolaan Sampah Perkotaan | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 15. Penyediaan Infrastruktur yang Ramah Kelompok Rentan | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan<br>Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur | Dinas Perhubungan |
| 6. Inovasi Pelayanan Publik, Penataan Daerah dan Stabilitasi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan | 05. Peningkatan Pendapatan Daerah | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |

| PROVINSI | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | 09. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan. | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | 10. Pengembangan Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik | Indeks Gini<br>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)<br>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | 11. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Independen dan Kesetaraan | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah<br>Nilai LPPD<br>Nilai Rata-rata IKM Kota<br>Nilai SAKIP Kota | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Dinas Arsip Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah<br>Nilai LPPD<br>Nilai Rata-rata IKM Kota<br>Nilai SAKIP Kota | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Dinas Pendidikan |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | 17. Peningkatan Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| PROVINSI | PRIORITAS KOTA | INDIKATOR SASARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Sekretariat Daerah |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan<br>Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri<br>Persentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi<br>Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan<br>Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Tengah<br>Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara<br>Penurunan Angka Gangguan Katentraman dan Ketertiban Masyarakat<br>Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani<br>Waktu respon tanggap kebakaran | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi<br>Opini BPK | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

*Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2025, BPKAD (Diolah)*

## 1.3. Prioritas Belanja Daerah Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Prioritas Pembangunan yang telah ditentukan maka disusun Prioritas Belanja Daerah berdasarkan Program Prioritas Pembangunan yang disusun dalam Tabel 3.3. berikut ini:

**Tabel 3.3**
**Prioritas serta Sasaran dan Program Prioritas**

| PRIORITAS KOTA | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 01. Menjaga Ketahanan Pangan Daerah | Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 78.743.800 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 992.185.066 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | Menurunnya Angka Kemiskinan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 2.687.592.050 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 02. Peningkatan Iklim Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja | Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1.517.403.950 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 3.639.048.400 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 1.287.523.300 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 2.857.383.460 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 750.000.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 524.620.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 365.000.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| PRIORITAS KOTA | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 98.960.000 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 586.098.400 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 03. Peningkatan Daya Beli Masyarakat | Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 2.097.066.000 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 1.216.070.978 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 2.221.051.148 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 992.185.066 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 04. Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Ekonomi dan Produk Lokal | Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 293.481.842 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 371.000.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 1.980.000.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 200.000.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 80.000.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 820.704.920 | Dinas Pangan dan Pertanian |

| PRIORITAS KOTA | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 172.000.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 275.636.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 2.097.066.000 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 850.000.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 30.000.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 1.216.070.978 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 300.682.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 130.303.300 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 255.000.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 2.221.051.148 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 4.344.823.982 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |

| PRIORITAS KOTA | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 50.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 1.824.851.182 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 4.743.091.108 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 30.000.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | 9.381.700 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 448.682.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 470.000.000 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 2.051.455.973 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 05. Peningkatan Pendapatan Daerah | Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 6.817.244.082 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| 06. Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga dan Sarana Prasarana Pendukung Layanan Kesehatan | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 248.849.700 | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 84.363.651.464 | Dinas Kesehatan |

| PRIORITAS KOTA | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | 147.500.000.000 | RSUD CIBABAT |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 807.419.500 | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 84.723.950 | Dinas Kesehatan |
| | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 899.526.317.274 | Dinas Kesehatan |
| 07. Percepatan Penurunan Stunting | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 231.863.651.464 | Dinas Kesehatan |
| 08. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 13.698.000 | Dinas Pendidikan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 127.824.497.298 | Dinas Pendidikan |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 90.119.750 | Dinas Pendidikan |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 29.440.000 | Dinas Pendidikan |
| 09. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan. | Meningkatkan Ketahanan Bencana | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 895.415.700 | Dinas Sosial |
| | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 3.760.970.600 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 3.285.002.100 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| PRIORITAS KOTA | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 447.516.650 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 231.863.651.464 | Dinas Kesehatan |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 546.931.750 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 80.026.700 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 825.247.800 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 384.479.700 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 155.142.800 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 971.644.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan |

| PRIORITAS KOTA | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 2.051.455.973 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Menurunnya Angka Kemiskinan | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 2.004.624.100 | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 5.917.760.815 | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 2.766.250.000 | Dinas Sosial |
| | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 899.526.317.274 | Dinas Sosial |
| 10. Pengembangan Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1.960.207.250 | Dinas Arsip Daerah |
| | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 899.526.317.274 | Sekretariat DPRD |
| 11. Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Independen dan Kesetaraan | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 3.285.002.100 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 825.247.800 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 524.620.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |

| PRIORITAS KOTA | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Terpadu Satu Pintu |
| | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 204.390.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 2.051.455.973 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 899.526.317.274 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 4.217.324.400 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 17.944.931.000 | Kecamatan Cimahi Utara |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 38.359.565.080 | Kecamatan Cimahi Utara |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 501.380.900 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 431.499.400 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 799.600.200 | Dinas Arsip Daerah |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 3.311.262.950 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 531.498.650 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 23.634.523.100 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

| PRIORITAS KOTA | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 26.999.700 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2.125.050.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.626.919.170 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | 12.328.384.450 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | 12.811.725.637 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | | | 7.509.858.191 | Dinas Arsip Daerah |
| | | | 9.123.658.293 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | 9.974.590.363 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | 10.969.584.404 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| | | | 8.839.997.477 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | 19.586.289.392 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | 271.382.181.176 | Dinas Pendidikan |
| | | | 11.578.831.910 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian |
| | | | 24.752.609.400 | Dinas Perhubungan |
| | | | 7.589.542.175 | Dinas Sosial |

| PRIORITAS KOTA | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| | | | 7.664.903.267 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | 13.483.130.866 | Inspektorat |
| | | | 21.027.767.660 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| | | | 88.727.995.306 | Sekretariat DPRD |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 2.753.612.600 | Kecamatan Cimahi Utara |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 1.742.819.372 | Inspektorat |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1.669.194.500 | Kecamatan Cimahi Utara |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 2.115.056.000 | Inspektorat |
| 12. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang | Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 10.001.755.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 13. Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Air | Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 1.180.001.200 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 180.996.070 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 15.060.966.482 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 11.420.780.710 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 11.819.863.900 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 3.233.096.190 | Dinas Lingkungan Hidup |

| PRIORITAS KOTA | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|---|---|
| 14. Pengelolaan Sampah Perkotaan | Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 32.029.320.720 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 443.179.300 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 15. Penyediaan Infrastruktur yang Ramah Kelompok Rentan | Menurunnya Angka Kemiskinan | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 14.551.507.800 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 232.065.000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 38.982.747.156 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 11.447.672.600 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 999.999.750 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 5.019.941.240 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 23.054.094.044 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 22.829.917.400 | Dinas Perhubungan |
| 16. Optimalisasi Pengelolaan Bencana | Meningkatkan Ketahanan Bencana | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 5.829.647.000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 17. Peningkatan Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 7.501.242.000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |

*Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2025, BPKAD (Diolah)*

# BAB IV
# PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

## 4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Prediksi anggaran tahun anggaran 2025 merupakan gambaran secara umum dan bersifat indikatif. Berprinsip pada sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka prioritas program dan plafon anggaran ditetapkan prioritas pembangunan Kota Cimahi dalam RKPD tahun 2025 dengan mempertimbangkan pada kemampuan perkiraan pos anggaran pendapatan dan pembiayaan di tahun 2025.

Sedangkan pertimbangan lain yang merupakan pendekatan penilaian anggaran terhadap prioritas program dan plafon anggaran untuk tahun 2025 bahwa dilihat dari fungsi pemerintah meliputi pengaturan (*regulating*), pelayanan (*service*) dan pemberdayaan (*empowering*). Dengan demikian pendanaan sendiri bersifat melekat yaitu fix cost belanja pegawai, given yaitu pendanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan juga pendanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan yang sumber dananya baik berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya pendanaannya yang bersifat *variable cost* yaitu pendanaan program yang pendekatannya atas dasar prioritas dan kesesuaian kebutuhan dalam

mendukung fungsi operasional pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di seluruh urusan daerah disesuaikan dengan kondisi isu permasalahan daerah, kemampuan baik keuangan, sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kota Cimahi tahun 2025.

Atas pendekatan kerangka anggaran dan kerangka regulasi tersebut dengan tetap berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Kota Cimahi Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025, maka prioritas program dan plafon anggaran Kota Cimahi tahun 2025 disusun serta menghasilkan plafon anggaran sebagai berikut :

**Tabel 4.1**
**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025**

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **1.005.519.673.151** | |
| **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | **399.339.936.224** | |
| **1.01.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Pendidikan** | **399.339.936.224** | |
| **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **271.382.181.176** | |
| **1.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **492.309.400** | |
| 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 54.479.750 | |
| 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.280.000 | |
| 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.280.000 | |
| 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 7.184.000 | |
| 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 7.184.000 | |
| 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 412.901.650 | |
| **1.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **268.150.641.556** | |
| 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 268.022.470.988 | |
| 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 13.506.490 | |
| 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 114.664.078 | |
| **1.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **256.850.064** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 133.232.064 | |
| 1.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 28.658.000 | |
| 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 13.720.000 | |
| 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 81.240.000 | |
| 1.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | - | |
| **1.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **356.605.464** | |
| 1.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 92.312.064 | |
| 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 72.000.000 | |
| 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 19.368.000 | |
| 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 39.660.000 | |
| 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 133.265.400 | |
| **1.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **507.903.564** | |
| 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 132.446.500 | |
| 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11.920.000 | |
| 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 129.040.064 | |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 38.000.000 | |
| 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 24.000.000 | |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 172.497.000 | |
| **1.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.165.713.000** | |
| 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 491.745.000 | |
| 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 573.968.000 | |
| 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.000.000 | |
| **1.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **117.232.064** | |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 68.980.000 | |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 48.252.064 | |
| **1.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **334.926.064** | |
| 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | 161.722.064 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | |
| 1.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 21.945.000 | |
| 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 66.340.000 | |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 84.919.000 | |
| **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **127.824.497.298** | |
| **1.01.02.2.01** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **60.267.183.883** | |
| 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 2.600.000.000 | |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 507.757.750 | |
| 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 3.199.183.384 | |
| 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 350.650.881 | |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 80.000.000 | |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 45.861.070.000 | |
| 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 287.169.478 | |
| 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | 275.669.500 | |
| 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 71.056.700 | |
| 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 65.589.000 | |
| 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 41.415.000 | |
| 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 55.190.000 | |
| 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 37.062.750 | |
| 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 37.515.000 | |
| 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 62.500.000 | |
| 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 760.503.700 | |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 2.605.960.140 | |
| 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 1.483.396.000 | |
| 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 135.426.000 | |
| 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | 77.199.600 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1.073.830.000 | |
| 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 599.039.000 | |
| **1.01.02.2.02** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **42.413.755.021** | |
| 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | 6.000.000.000 | |
| 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | 790.331.625 | |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 1.701.380.500 | |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 2.643.639.584 | |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 854.452.660 | |
| 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1.503.849.492 | |
| 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 20.241.000 | |
| 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 67.634.360 | |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 27.168.240.000 | |
| 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 57.184.000 | |
| 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 73.876.000 | |
| 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 62.492.800 | |
| 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 40.000.000 | |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 144.344.300 | |
| 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 111.000.000 | |
| 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 61.287.000 | |
| 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 89.491.700 | |
| 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 77.076.100 | |
| 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | - | |
| 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 104.526.000 | |
| 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 347.004.900 | |
| 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | 495.703.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.01.02.2.03** | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **12.021.656.400** | |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 206.378.000 | |
| 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 600.000.000 | |
| 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 3.734.059.100 | |
| 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | 329.632.900 | |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | 94.960.000 | |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 6.142.560.000 | |
| 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 27.550.400 | |
| 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | 71.129.400 | |
| 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | 71.129.400 | |
| 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 49.000.000 | |
| 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 13.635.000 | |
| 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 38.868.900 | |
| 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 118.649.900 | |
| 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 217.806.600 | |
| 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | 150.000.000 | |
| 1.01.02.2.03.0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 156.296.800 | |
| **1.01.02.2.04** | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **13.121.901.994** | |
| 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 481.020.000 | |
| 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 54.752.400 | |
| 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 86.355.000 | |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 4.700.550.000 | |
| 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 53.410.000 | |
| 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 49.000.000 | |
| 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | 13.635.000 | |
| 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 36.250.500 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 135.114.000 | |
| 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 56.809.900 | |
| 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 7.455.005.194 | |
| **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **90.119.750** | |
| **1.01.03.2.01** | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar** | **45.159.750** | |
| 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 45.159.750 | |
| 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 44.960.000 | |
| 1.01.03.2.02.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | 44.960.000 | |
| **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **13.698.000** | |
| **1.01.04.2.01** | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **13.698.000** | |
| 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 6.930.000 | |
| 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 6.768.000 | |
| **1.01.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **29.440.000** | |
| **1.01.05.2.01** | **Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **10.000.000** | |
| 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 5.000.000 | |
| 1.01.05.2.01.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 5.000.000 | |
| **1.01.05.2.02** | **Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat** | **19.440.000** | |
| 1.01.05.2.02.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 10.000.000 | |
| 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 4.440.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.05.2.02.0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 5.000.000 | |
| **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | **369.033.195.812** | |
| **1.02.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Kesehatan** | **168.490.271.560** | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **82.985.626.946** | |
| **1.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **365.841.400** | |
| 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 287.114.000 | |
| 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 78.727.400 | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **58.489.135.118** | |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 58.223.175.118 | |
| 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 265.960.000 | |
| **1.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **295.150.000** | |
| 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 48.000.000 | |
| 1.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 247.150.000 | |
| **1.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **648.668.300** | |
| 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.002.000 | |
| 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 112.549.700 | |
| 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 38.346.000 | |
| 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 148.901.600 | |
| 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 133.532.000 | |
| 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 205.337.000 | |
| **1.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **655.054.000** | |
| 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 38.900.000 | |
| **1.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **304.704.000** | |
| 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 125.200.000 | |
| 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 179.504.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **710.314.128** | |
| 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 583.114.128 | |
| 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 127.200.000 | |
| **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **21.516.760.000** | |
| 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 21.516.760.000 | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **84.363.651.464** | |
| **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **35.533.934.577** | |
| 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | 312.176.200 | |
| 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 21.039.237.500 | |
| 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | 9.937.183.677 | |
| 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 485.578.200 | |
| 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | - | |
| 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 3.542.833.000 | |
| 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | 216.926.000 | |
| **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **48.314.324.887** | |
| 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 311.005.500 | |
| 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 724.189.700 | |
| 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 239.032.200 | |
| 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 334.903.000 | |
| 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 96.420.000 | |
| 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 412.283.700 | |
| 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 239.128.400 | |
| 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 54.044.400 | |
| 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 730.220.400 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 166.621.200 | |
| 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 300.093.450 | |
| 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 553.231.500 | |
| 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 2.801.352.000 | |
| 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 108.800.750 | |
| 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 382.707.150 | |
| 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 301.010.600 | |
| 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 122.618.400 | |
| 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 846.438.600 | |
| 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 36.700.576.637 | |
| 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 150.991.900 | |
| 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 99.880.000 | |
| 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 408.108.000 | |
| 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1.754.502.900 | |
| 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | 126.212.000 | |
| 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | 136.920.000 | |
| 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | 213.032.500 | |
| **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **180.392.000** | |
| 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 180.392.000 | |
| **1.02.02.2.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **335.000.000** | |
| 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 335.000.000 | |
| **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **807.419.500** | |
| **1.02.03.2.02** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **387.419.500** | |
| 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 387.419.500 | |
| **1.02.03.2.03** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **420.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 420.000.000 | |
| **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **84.723.950** | |
| **1.02.04.2.01** | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **43.870.000** | |
| 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 43.870.000 | |
| **1.02.04.2.03** | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | **40.853.950** | |
| 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 40.853.950 | |
| **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **248.849.700** | |
| **1.02.05.2.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **247.774.200** | |
| 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 247.774.200 | |
| **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.075.500** | |
| 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1.075.500 | |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 | RSUD CIBABAT | 200.542.924.252 | |
| **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **53.042.924.252** | |
| **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **53.042.924.252** | |
| 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 53.042.924.252 | |
| **1.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **-** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | |
| 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | |
| 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | |
| **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **147.500.000.000** | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 147.500.000.000 | |
| 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 147.500.000.000 | |
| **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | **127.301.068.374** | |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 84.039.474.992 | |
| **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **11.000.879.042** | |
| **1.03.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **99.394.350** | |
| 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 94.894.400 | |
| 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.499.950 | |
| **1.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **8.922.500.192** | |
| 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.873.780.792 | |
| 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 999.800 | |
| 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 47.719.600 | |
| **1.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **-** | |
| 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | |
| **1.03.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **91.100.000** | |
| 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 24.600.000 | |
| 1.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 66.500.000 | |
| **1.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **403.809.500** | |
| 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 72.966.000 | |
| 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 124.723.500 | |
| 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7.120.000 | |
| 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 24.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 175.000.000 | |
| **1.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **689.000.000** | |
| 1.03.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 600.000.000 | |
| 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | |
| 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 89.000.000 | |
| **1.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **206.905.000** | |
| 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 94.656.000 | |
| 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.000.000 | |
| 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 88.249.000 | |
| **1.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **588.170.000** | |
| 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 555.110.000 | |
| 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 33.060.000 | |
| **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **38.982.747.156** | |
| **1.03.08.2.01** | **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** | **38.982.747.156** | |
| 1.03.08.2.01.0015 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | |
| 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | - | |
| 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1.489.908.000 | |
| 1.03.08.2.01.0019 | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 50.000.000 | |
| 1.03.08.2.01.0020 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | 15.000.000 | |
| 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 36.277.818.486 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.08.2.01.0022 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 100.000.000 | |
| 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 1.000.020.670 | |
| **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **23.054.094.044** | |
| **1.03.10.2.01** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **23.054.094.044** | |
| 1.03.10.2.01.0028 | Pengelolaan Leger Jalan | 300.000.000 | |
| 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | - | |
| 1.03.10.2.01.0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | - | |
| 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | - | |
| 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | 13.249.744.044 | |
| 1.03.10.2.01.0035 | Pembangunan Flyover | 3.054.250.000 | |
| 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | - | |
| 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | - | |
| 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | - | |
| 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 700.000.000 | |
| 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | 4.700.100.000 | |
| 1.03.10.2.01.0047 | Pembangunan Underpass | - | |
| 1.03.10.2.01.0048 | Pelebaran Jembatan | 1.050.000.000 | |
| **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **999.999.750** | |
| **1.03.11.2.01** | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** | **700.000.000** | |
| 1.03.11.2.01.0009 | Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 100.000.000 | |
| 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 400.000.000 | |
| 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | 200.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.11.2.01.0012 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | - | |
| 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | - | |
| **1.03.11.2.02** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **150.000.000** | |
| 1.03.11.2.02.0012 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | - | |
| 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | 150.000.000 | |
| **1.03.11.2.04** | **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** | **149.999.750** | |
| 1.03.11.2.04.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | 49.999.750 | |
| 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | 100.000.000 | |
| **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **10.001.755.000** | |
| **1.03.12.2.01** | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **261.233.000** | |
| 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | 151.000.000 | |
| 1.03.12.2.01.0011 | Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | - | |
| 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | 110.233.000 | |
| **1.03.12.2.02** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **65.100.000** | |
| 1.03.12.2.02.0008 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 65.100.000 | |
| **1.03.12.2.03** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **9.144.886.000** | |
| 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | 289.886.000 | |
| 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | 8.855.000.000 | |
| **1.03.12.2.04** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **530.536.000** | |
| 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 230.880.000 | |
| 1.03.12.2.04.0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | 258.400.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.12.2.04.0015 | Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal | 41.256.000 | |
| **1.04.1.03.2.10.01.0000** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | **42.818.414.082** | |
| **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **11.819.863.900** | |
| **1.03.02.2.01** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **10.651.139.000** | |
| 1.03.02.2.01.0073 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai | 3.103.660.850 | |
| 1.03.02.2.01.0089 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | 188.280.000 | |
| 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | 6.424.162.650 | |
| 1.03.02.2.01.0114 | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | 70.000.000 | |
| 1.03.02.2.01.0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | 865.035.500 | |
| **1.03.02.2.02** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **1.168.724.900** | |
| 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 719.758.200 | |
| 1.03.02.2.02.0015 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | 73.000.000 | |
| 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 375.966.700 | |
| **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **15.060.966.482** | |
| **1.03.03.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **15.060.966.482** | |
| 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 129.472.000 | |
| 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 1.524.938.300 | |
| 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 2.515.600.000 | |
| 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 6.210.000.000 | |
| 1.03.03.2.01.0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 1.855.956.182 | |
| 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 2.825.000.000 | |
| **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **11.447.672.600** | |
| **1.03.05.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **11.447.672.600** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 62.691.200 | |
| 1.03.05.2.01.0024 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | 764.114.400 | |
| 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 784.411.500 | |
| 1.03.05.2.01.0036 | Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) | 3.722.700.000 | |
| 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 2.199.311.100 | |
| 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 2.437.347.200 | |
| 1.03.05.2.01.0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 336.402.000 | |
| 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 1.140.695.200 | |
| **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **4.489.911.100** | |
| **1.03.06.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **4.489.911.100** | |
| 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | 1.108.895.400 | |
| 1.03.06.2.01.0026 | Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan | 126.594.300 | |
| 1.03.06.2.01.0027 | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan | 100.000.000 | |
| 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 754.953.300 | |
| 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 1.950.258.200 | |
| 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | 449.209.900 | |
| **2.11.1.03.0.00.02.0000** | **Dinas Lingkungan Hidup** | **443.179.300** | |
| **1.03.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | **443.179.300** | |
| **1.03.04.2.01** | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** | **443.179.300** | |
| 1.03.04.2.01.0013 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | - | |
| 1.03.04.2.01.0016 | Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 443.179.300 | |
| **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | **47.949.737.651** | |
| **1.04.1.03.2.10.01.0000** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | **47.949.737.651** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.04.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **15.372.550.611** | |
| **1.04.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **181.532.700** | |
| 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 72.907.700 | |
| 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 108.625.000 | |
| **1.04.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.293.350.011** | |
| 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.287.202.311 | |
| 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.147.700 | |
| **1.04.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **409.240.000** | |
| 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 37.200.000 | |
| 1.04.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 372.040.000 | |
| **1.04.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **574.961.000** | |
| 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.395.000 | |
| 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 152.945.000 | |
| 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 33.963.000 | |
| 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 87.063.000 | |
| 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 24.000.000 | |
| 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 175.595.000 | |
| 1.04.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100.000.000 | |
| **1.04.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.453.854.000** | |
| 1.04.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 1.04.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 402.700.000 | |
| 1.04.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 435.000.000 | |
| **1.04.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **918.388.800** | |
| 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 125.298.000 | |
| 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 750.350.800 | |
| 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 42.740.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.04.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.541.224.100** | |
| 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.348.179.100 | |
| 1.04.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 4.125.000 | |
| 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 68.920.000 | |
| 1.04.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | 1.120.000.000 | |
| **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **5.019.941.240** | |
| **1.04.02.2.01** | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **95.120.000** | |
| 1.04.02.2.01.0007 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 40.000.000 | |
| 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 55.120.000 | |
| **1.04.02.2.03** | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **329.153.000** | |
| 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 329.153.000 | |
| **1.04.02.2.05** | **Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** | **4.595.668.240** | |
| 1.04.02.2.05.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | 4.595.668.240 | |
| **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **14.551.507.800** | |
| **1.04.03.2.02** | **Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **702.580.800** | |
| 1.04.03.2.02.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | 432.322.800 | |
| 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | 146.664.000 | |
| 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | 123.594.000 | |
| **1.04.03.2.03** | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha** | **13.848.927.000** | |
| 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 13.636.927.000 | |
| 1.04.03.2.03.0009 | Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh | 212.000.000 | |
| **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **232.065.000** | |
| **1.04.04.2.01** | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota** | **232.065.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.04.04.2.01.0008 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | 232.065.000 | |
| **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **12.773.673.000** | |
| **1.04.05.2.01** | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **12.773.673.000** | |
| 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 4.000.000.000 | |
| 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 8.773.673.000 | |
| **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | **42.722.142.300** | |
| **1.05.0.00.0.00.03.0000** | **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** | **31.604.962.300** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **21.027.767.660** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1.050.901.360** | |
| 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 135.931.600 | |
| 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 80.087.800 | |
| 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 834.881.960 | |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **15.882.157.514** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.728.526.164 | |
| 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 19.188.800 | |
| 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 134.442.550 | |
| **1.05.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **440.376.700** | |
| 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 282.194.700 | |
| 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 158.182.000 | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **513.724.050** | |
| 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.892.000 | |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 171.207.000 | |
| 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 74.503.000 | |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 76.169.050 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.000.000 | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 174.953.000 | |
| **1.05.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **820.490.000** | |
| 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 600.000.000 | |
| 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | |
| 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 220.490.000 | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **406.251.300** | |
| 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 44.610.000 | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 67.197.300 | |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 294.444.000 | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.913.866.736** | |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.817.545.740 | |
| 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 96.320.996 | |
| **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **7.501.242.000** | |
| **1.05.02.2.01** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **6.313.642.000** | |
| 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | 67.125.000 | |
| 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | 3.101.415.000 | |
| 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 729.432.000 | |
| 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 2.395.540.000 | |
| 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | 20.130.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.05.02.2.02** | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **1.160.396.000** | |
| 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 484.550.000 | |
| 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | 486.846.000 | |
| 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 189.000.000 | |
| **1.05.02.2.03** | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | **27.204.000** | |
| 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | 27.204.000 | |
| **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **3.075.952.640** | |
| **1.05.04.2.01** | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **2.443.325.140** | |
| 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.707.485.000 | |
| 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 355.793.900 | |
| 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 380.046.240 | |
| **1.05.04.2.02** | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | **336.360.000** | |
| 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 184.800.000 | |
| 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 151.560.000 | |
| **1.05.04.2.04** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **296.267.500** | |
| 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 94.746.500 | |
| 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | 201.521.000 | |
| **1.05.0.00.0.00.04.0000** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | **11.117.180.000** | |
| **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **5.287.533.000** | |
| **1.05.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **96.058.350** | |
| 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 62.793.350 | |
| 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 33.265.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2.708.507.480** | |
| 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.678.551.480 | |
| 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 29.956.000 | |
| **1.05.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **47.978.120** | |
| 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 47.978.120 | |
| **1.05.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **256.874.980** | |
| 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 49.454.430 | |
| 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 125.301.850 | |
| 1.05.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 82.118.700 | |
| **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **472.635.542** | |
| 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 115.177.772 | |
| 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 126.773.000 | |
| 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.714.770 | |
| 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 174.970.000 | |
| **1.05.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.080.380.088** | |
| 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | |
| 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 645.380.088 | |
| 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 435.000.000 | |
| **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **377.238.440** | |
| 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 57.523.640 | |
| 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 44.715.000 | |
| 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 274.999.800 | |
| **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **247.860.000** | |
| 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 247.860.000 | |
| 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | |
| **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **5.829.647.000** | |
| **1.05.03.2.01** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **275.642.050** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 275.642.050 | |
| **1.05.03.2.02** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **4.097.539.900** | |
| 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | 78.320.000 | |
| 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 289.354.000 | |
| 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | 123.088.000 | |
| 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 70.864.500 | |
| 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 3.090.333.000 | |
| 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 61.965.400 | |
| 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | 100.800.000 | |
| 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 128.827.000 | |
| 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 153.988.000 | |
| **1.05.03.2.03** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **1.019.827.950** | |
| 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 26.946.700 | |
| 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 729.888.000 | |
| 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 200.492.450 | |
| 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 62.500.800 | |
| **1.05.03.2.04** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **436.637.100** | |
| 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | 140.671.100 | |
| 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 295.966.000 | |
| **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | **19.173.592.790** | |
| **1.06.1.06.0.00.06.0000** | **Dinas Sosial** | **19.173.592.790** | |
| **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.589.542.175** | |
| **1.06.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **193.492.650** | |
| 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 110.283.000 | |
| 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 83.209.650 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.06.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.462.394.575** | |
| 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.411.005.975 | |
| 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 51.388.600 | |
| **1.06.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **228.784.000** | |
| 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 52.029.000 | |
| 1.06.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 176.755.000 | |
| **1.06.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **394.523.150** | |
| 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.452.000 | |
| 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 144.063.600 | |
| 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 29.415.000 | |
| 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 27.592.750 | |
| 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9.000.000 | |
| 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 174.999.800 | |
| **1.06.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **969.154.000** | |
| 1.06.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 1.06.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 353.000.000 | |
| **1.06.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **177.942.000** | |
| 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 59.340.000 | |
| 1.06.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.780.000 | |
| 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 103.822.000 | |
| **1.06.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **163.251.800** | |
| 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 163.251.800 | |
| **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **2.004.624.100** | |
| **1.06.02.2.03** | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **2.004.624.100** | |
| 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 744.012.400 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 139.287.800 | |
| 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 892.967.900 | |
| 1.06.02.2.03.0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 228.356.000 | |
| **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **2.766.250.000** | |
| **1.06.04.2.01** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **2.747.818.000** | |
| 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | 150.600.000 | |
| 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | 158.955.000 | |
| 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | 179.979.000 | |
| 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 9.600.000 | |
| 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 757.680.000 | |
| 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 49.000.000 | |
| 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | 5.145.000 | |
| 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 4.900.000 | |
| 1.06.04.2.01.0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 13.959.000 | |
| 1.06.04.2.01.0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 1.329.920.000 | |
| 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 6.720.000 | |
| 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan | 81.360.000 | |
| **1.06.04.2.02** | **Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** | **18.432.000** | |
| 1.06.04.2.02.0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 5.472.000 | |
| 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 6.720.000 | |
| 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan | 1.500.000 | |
| 1.06.04.2.02.0006 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | 4.740.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **5.917.760.815** | |
| 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | 160.097.150 | |
| 1.06.05.2.01.0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | 90.175.550 | |
| 1.06.05.2.01.0002 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | 23.465.300 | |
| 1.06.05.2.01.0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | 46.456.300 | |
| **1.06.05.2.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **5.757.663.665** | |
| 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 457.496.440 | |
| 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 340.823.025 | |
| 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 4.839.344.100 | |
| 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 120.000.100 | |
| **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **895.415.700** | |
| **1.06.06.2.01** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **236.061.000** | |
| 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | 70.000.000 | |
| 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang | 54.801.000 | |
| 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 75.000.000 | |
| 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 24.500.000 | |
| 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | 11.760.000 | |
| **1.06.06.2.02** | **Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** | **659.354.700** | |
| 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | 59.416.800 | |
| 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 599.937.900 | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **282.467.594.673** | |
| **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | **15.777.699.077** | |
| **2.07.3.32.0.00.01.0000** | **Dinas Tenaga Kerja** | **15.777.699.077** | |
| **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.664.903.267** | |
| **2.07.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **181.833.200** | |
| 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 80.338.800 | |
| 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.803.700 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.222.000 | |
| 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.154.900 | |
| 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.164.000 | |
| 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 83.149.800 | |
| **2.07.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.649.257.877** | |
| 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.589.114.347 | |
| 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.388.400 | |
| 2.07.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 54.755.130 | |
| **2.07.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **10.468.120** | |
| 2.07.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 10.468.120 | |
| **2.07.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **152.154.300** | |
| 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 14.400.000 | |
| 2.07.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 137.754.300 | |
| **2.07.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **360.314.770** | |
| 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 56.704.000 | |
| 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 70.836.000 | |
| 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.000.770 | |
| 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 24.000.000 | |
| 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 35.000.000 | |
| 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 118.774.000 | |
| **2.07.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 880.230.000 | |
| 2.07.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 600.000.000 | |
| 2.07.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 280.230.000 | |
| **2.07.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **196.048.000** | |
| 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18.599.000 | |
| 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 177.449.000 | |
| **2.07.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **234.597.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 216.487.000 | |
| 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 18.110.000 | |
| **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **98.960.000** | |
| **2.07.02.2.01** | **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)** | **98.960.000** | |
| 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 98.960.000 | |
| **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **3.639.048.400** | |
| **2.07.03.2.01** | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **3.420.486.400** | |
| 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 3.420.486.400 | |
| **2.07.03.2.02** | **Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** | **131.439.000** | |
| 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 131.439.000 | |
| **2.07.03.2.04** | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil** | **23.426.000** | |
| 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | 23.426.000 | |
| **2.07.03.2.05** | **Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **63.697.000** | |
| 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 63.697.000 | |
| **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **2.857.383.460** | |
| **2.07.04.2.01** | **Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota** | **1.879.703.460** | |
| 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | 174.856.460 | |
| 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | 146.203.000 | |
| 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 24.572.000 | |
| 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | 1.534.072.000 | |
| **2.07.04.2.03** | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **297.063.000** | |
| 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | 81.009.000 | |
| 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 216.054.000 | |
| **2.07.04.2.04** | **Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota** | **680.617.000** | |
| 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | 680.617.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **1.517.403.950** | |
| **2.07.05.2.01** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **593.045.800** | |
| 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 24.707.000 | |
| 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | 24.707.000 | |
| 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 543.631.800 | |
| **2.07.05.2.02** | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **924.358.150** | |
| 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 470.800.950 | |
| 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 133.734.100 | |
| 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | 210.343.000 | |
| 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 109.480.100 | |
| 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | - | |
| **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | **11.425.739.077** | |
| **2.08.2.14.2.13.01.0000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | **11.425.739.077** | |
| **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **8.839.997.477** | |
| **2.08.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **132.129.550** | |
| 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 63.324.800 | |
| 2.08.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 68.804.750 | |
| **2.08.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.919.390.560** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.867.950.860 | |
| 2.08.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 51.439.700 | |
| **2.08.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **143.790.000** | |
| 2.08.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 39.000.000 | |
| 2.08.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 21.000.000 | |
| 2.08.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 83.790.000 | |
| **2.08.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **506.588.650** | |
| 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11.578.000 | |
| 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 161.819.500 | |
| 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.000.000 | |
| 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.074.400 | |
| 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 62.432.750 | |
| 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9.450.000 | |
| 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 176.234.000 | |
| **2.08.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **630.000.000** | |
| 2.08.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 555.000.000 | |
| 2.08.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 75.000.000 | |
| **2.08.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **189.329.457** | |
| 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 28.882.957 | |
| 2.08.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.780.000 | |
| 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 114.666.500 | |
| **2.08.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **318.769.260** | |
| 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 318.769.260 | |
| 2.08.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | |
| **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **546.931.750** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.08.02.2.01** | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **332.337.000** | |
| 2.08.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 332.337.000 | |
| **2.08.02.2.02** | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **214.594.750** | |
| 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 214.594.750 | |
| **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **971.644.000** | |
| **2.08.03.2.02** | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **971.644.000** | |
| 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 971.644.000 | |
| **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **384.479.700** | |
| **2.08.04.2.01** | **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **384.479.700** | |
| 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 384.479.700 | |
| **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **80.026.700** | |
| **2.08.05.2.01** | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **80.026.700** | |
| 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 80.026.700 | |
| **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **447.516.650** | |
| **2.08.06.2.01** | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** | **447.516.650** | |
| 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 266.335.900 | |
| 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 181.180.750 | |
| **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **155.142.800** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.08.07.2.01** | **Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **155.142.800** | |
| 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | 155.142.800 | |
| **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | **14.728.105.320** | |
| **2.09.3.27.3.25.02.0000** | **Dinas Pangan dan Pertanian** | **14.728.105.320** | |
| **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **10.969.584.404** | |
| **2.09.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **164.475.650** | |
| 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 86.439.550 | |
| 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24.397.850 | |
| 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53.638.250 | |
| **2.09.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **8.631.579.675** | |
| 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.631.579.675 | |
| **2.09.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **93.903.990** | |
| 2.09.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 31.800.000 | |
| 2.09.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 62.103.990 | |
| **2.09.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **519.324.946** | |
| 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.561.000 | |
| 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 186.955.950 | |
| 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32.499.996 | |
| 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.200.000 | |
| 2.09.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25.000.000 | |
| 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 238.608.000 | |
| 2.09.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 14.500.000 | |
| **2.09.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **946.429.350** | |
| 2.09.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 2.09.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 330.275.350 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.09.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **401.728.613** | |
| 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.200.000 | |
| 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 79.287.629 | |
| 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 321.240.984 | |
| **2.09.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **212.142.180** | |
| 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 191.702.180 | |
| 2.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.440.000 | |
| **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **992.185.066** | |
| **2.09.03.2.01** | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **309.898.548** | |
| 2.09.03.2.01.0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | 209.975.748 | |
| 2.09.03.2.01.0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | 45.173.400 | |
| 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | 54.749.400 | |
| **2.09.03.2.02** | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** | **209.822.500** | |
| 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 209.822.500 | |
| **2.09.03.2.04** | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **472.464.018** | |
| 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 177.000.000 | |
| 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 295.464.018 | |
| **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **2.687.592.050** | |
| **2.09.04.2.01** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **24.019.900** | |
| 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 24.019.900 | |
| **2.09.04.2.02** | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** | **2.663.572.150** | |
| 2.09.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran | 2.653.572.100 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 10.000.050 | |
| **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **78.743.800** | |
| **2.09.05.2.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** | **78.743.800** | |
| 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 28.743.800 | |
| 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | |
| **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | **43.120.000** | |
| **1.04.1.03.2.10.01.0000** | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** | **43.120.000** | |
| **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **43.120.000** | |
| **2.10.04.2.01** | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **43.120.000** | |
| 2.10.04.2.01.0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 43.120.000 | |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | **72.627.558.930** | |
| **2.11.1.03.0.00.02.0000** | **Dinas Lingkungan Hidup** | **72.627.558.930** | |
| **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **23.730.761.240** | |
| **2.11.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **243.841.064** | |
| 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 121.063.000 | |
| 2.11.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 13.895.000 | |
| 2.11.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.380.000 | |
| 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 8.328.500 | |
| 2.11.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6.310.500 | |
| 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 84.864.064 | |
| **2.11.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **13.850.013.644** | |
| 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.795.260.194 | |
| 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 36.819.450 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.000.000 | |
| 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 7.934.000 | |
| **2.11.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **24.955.250** | |
| 2.11.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 9.999.500 | |
| 2.11.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4.999.750 | |
| 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.956.000 | |
| **2.11.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **648.789.000** | |
| 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 61.200.000 | |
| 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50.000.000 | |
| 2.11.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 537.589.000 | |
| **2.11.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **847.007.400** | |
| 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.000.000 | |
| 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 336.076.400 | |
| 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100.000.000 | |
| 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 103.966.000 | |
| 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 19.992.000 | |
| 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 284.973.000 | |
| **2.11.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **821.154.000** | |
| 2.11.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 2.11.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 205.000.000 | |
| **2.11.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **836.510.882** | |
| 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 88.500.128 | |
| 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 701.305.490 | |
| 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 46.705.264 | |
| **2.11.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **6.458.490.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.330.000 | |
| 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6.420.160.000 | |
| **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **734.414.000** | |
| **2.11.02.2.01** | **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** | **300.100.000** | |
| 2.11.02.2.01.0004 | Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota | 300.100.000 | |
| **2.11.02.2.02** | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** | **434.314.000** | |
| 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 199.497.000 | |
| 2.11.02.2.02.0005 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | 234.817.000 | |
| **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **3.233.096.190** | |
| **2.11.03.2.01** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **3.233.096.190** | |
| 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 482.973.500 | |
| 2.11.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 749.840.290 | |
| 2.11.03.2.01.0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | 200.282.400 | |
| 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | 1.800.000.000 | |
| **2.11.03.2.02** | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **-** | |
| 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | - | |
| **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **11.420.780.710** | |
| **2.11.04.2.01** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **11.420.780.710** | |
| 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 491.280.710 | |
| 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | 10.279.500.000 | |
| 2.11.04.2.01.0009 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | 650.000.000 | |
| **2.11.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH** | **118.188.800** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | | |
| **2.11.05.2.01** | **Penyimpanan sementara Limbah B3** | **118.188.800** | |
| 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 108.188.900 | |
| 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | 9.999.900 | |
| **2.11.05.2.02** | **Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **-** | |
| 2.11.05.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | - | |
| **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **1.180.001.200** | |
| **2.11.06.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **1.180.001.200** | |
| 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 279.999.750 | |
| 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 900.001.450 | |
| **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **180.996.070** | |
| **2.11.10.2.01** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **180.996.070** | |
| 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | 57.313.910 | |
| 2.11.10.2.01.0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 123.682.160 | |
| **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **32.029.320.720** | |
| **2.11.11.2.01** | **Pengelolaan Sampah** | **32.029.320.720** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 1.977.031.600 | |
| 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 3.135.965.500 | |
| 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | 340.415.000 | |
| 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | 12.364.271.590 | |
| 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | 1.746.874.300 | |
| 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 5.001.157.230 | |
| 2.11.11.2.01.0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | 4.131.250.400 | |
| 2.11.11.2.01.0021 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | 3.332.355.100 | |
| **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | **11.465.969.013** | |
| **2.12.0.00.0.00.02.0000** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | **11.465.969.013** | |
| **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **9.974.590.363** | |
| 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 74.499.600 | |
| 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 42.499.700 | |
| 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.999.900 | |
| **2.12.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.274.930.671** | |
| 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.265.718.971 | |
| 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.999.850 | |
| 2.12.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4.211.850 | |
| **2.12.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **84.286.500** | |
| 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 36.000.000 | |
| 2.12.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 48.286.500 | |
| **2.12.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.359.895.472** | |
| 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 870.496.992 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 15.620.000 | |
| 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 73.890.000 | |
| 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 75.556.480 | |
| 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.036.000 | |
| 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 235.517.000 | |
| 2.12.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 73.779.000 | |
| **2.12.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **701.154.000** | |
| 2.12.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 2.12.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 85.000.000 | |
| **2.12.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **129.291.000** | |
| 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.900.000 | |
| 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 104.391.000 | |
| **2.12.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **350.533.120** | |
| 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 218.023.120 | |
| 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 132.510.000 | |
| **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **431.499.400** | |
| **2.12.02.2.01** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **247.352.000** | |
| 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 32.552.000 | |
| 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 214.800.000 | |
| **2.12.02.2.02** | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **63.000.000** | |
| 2.12.02.2.02.0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | 63.000.000 | |
| **2.12.02.2.03** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **121.147.400** | |
| 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 52.224.000 | |
| 2.12.02.2.03.0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 68.923.400 | |
| **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **501.380.900** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.12.03.2.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **367.720.750** | |
| 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | 367.720.750 | |
| **2.12.03.2.02** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **110.336.150** | |
| 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 42.867.150 | |
| 2.12.03.2.02.0006 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | 67.469.000 | |
| **2.12.03.2.03** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **23.324.000** | |
| 2.12.03.2.03.0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | 23.324.000 | |
| **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **531.498.650** | |
| **2.12.04.2.01** | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** | **89.499.650** | |
| 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 72.999.700 | |
| 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 16.499.950 | |
| **2.12.04.2.03** | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **408.998.900** | |
| 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 226.998.750 | |
| 2.12.04.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 182.000.150 | |
| **2.12.04.2.04** | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **33.000.100** | |
| 2.12.04.2.04.0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 33.000.100 | |
| **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **26.999.700** | |
| **2.12.05.2.01** | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **26.999.700** | |
| 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | 26.999.700 | |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | **2.255.845.973** | |
| 2.08.2.14.2.13.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.255.845.973 | |
| **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **204.390.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.13.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **204.390.000** | |
| 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 16.880.000 | |
| 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 187.510.000 | |
| **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **2.051.455.973** | |
| **2.13.05.2.01** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **2.051.455.973** | |
| 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 459.192.000 | |
| 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 231.690.260 | |
| 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 516.492.013 | |
| 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 51.814.900 | |
| 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 188.819.000 | |
| 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 603.447.800 | |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **7.871.220.500** | |
| **2.08.2.14.2.13.01.0000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | **7.871.220.500** | |
| **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **825.247.800** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.14.02.2.01** | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | **162.967.100** | |
| 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 79.211.450 | |
| 2.14.02.2.01.0013 | Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | 23.755.650 | |
| 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | 60.000.000 | |
| **2.14.02.2.02** | **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **662.280.700** | |
| 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | 612.280.700 | |
| 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 50.000.000 | |
| **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **3.285.002.100** | |
| **2.14.03.2.01** | **Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** | **637.000.000** | |
| 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | 80.000.000 | |
| 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | 58.000.000 | |
| 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 45.000.000 | |
| 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 150.000.000 | |
| 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | 54.000.000 | |
| 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 250.000.000 | |
| **2.14.03.2.02** | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **1.662.372.000** | |
| 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 879.372.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | - | |
| 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 783.000.000 | |
| **2.14.03.2.03** | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** | **734.722.100** | |
| 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 11.200.000 | |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 457.925.000 | |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 51.600.000 | |
| 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 188.997.100 | |
| 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan | 25.000.000 | |
| **2.14.03.2.04** | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | **250.908.000** | |
| 2.14.03.2.04.0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 58.773.000 | |
| 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | 146.250.000 | |
| 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | 45.885.000 | |
| **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **3.760.970.600** | |
| **2.14.04.2.01** | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **3.546.295.750** | |
| 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 83.580.250 | |
| 2.14.04.2.01.0014 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan | 25.110.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | |
| 2.14.04.2.01.0015 | Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL | 51.600.000 | |
| 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 335.005.500 | |
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 180.000.000 | |
| 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 51.600.000 | |
| 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 30.000.000 | |
| 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 2.759.400.000 | |
| 2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | 30.000.000 | |
| **2.14.04.2.02** | **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **214.674.850** | |
| 2.14.04.2.02.0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 164.674.850 | |
| 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 50.000.000 | |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | **47.582.526.800** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.15.0.00.0.00.01.0000** | **Dinas Perhubungan** | **47.582.526.800** | |
| **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **24.752.609.400** | |
| **2.15.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **223.203.800** | |
| 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 122.203.900 | |
| 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.999.900 | |
| **2.15.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.774.346.170** | |
| 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.740.000.170 | |
| 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.424.000 | |
| 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 24.922.000 | |
| **2.15.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **615.101.950** | |
| 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 282.579.000 | |
| 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 45.000.000 | |
| 2.15.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 287.522.950 | |
| **2.15.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **661.723.950** | |
| 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000 | |
| 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 53.350.000 | |
| 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | |
| 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 80.401.000 | |
| 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 212.972.950 | |
| 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 24.000.000 | |
| 2.15.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6.000.000 | |
| 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 275.000.000 | |
| **2.15.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.152.840.000** | |
| 2.15.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | |
| 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | - | |
| 2.15.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 210.974.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.15.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.688.000 | |
| 2.15.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 300.024.000 | |
| 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11.308.678.530 | |
| 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 11.082.916.530 | |
| 2.15.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | |
| 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 225.762.000 | |
| **2.15.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.016.715.000** | |
| 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 977.715.000 | |
| 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | |
| 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | |
| 2.15.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 39.000.000 | |
| **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **22.829.917.400** | |
| **2.15.02.2.01** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** | **505.464.000** | |
| 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 505.464.000 | |
| 2.15.02.2.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | - | |
| **2.15.02.2.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** | **13.145.694.950** | |
| 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 8.251.521.600 | |
| 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 1.321.465.000 | |
| 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | 2.666.548.350 | |
| 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 906.160.000 | |
| **2.15.02.2.03** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **602.736.200** | |
| 2.15.02.2.03.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | - | |
| 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C | 527.763.300 | |
| 2.15.02.2.03.0009 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | - | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | 74.972.900 | |
| **2.15.02.2.04** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** | **282.153.000** | |
| 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 282.153.000 | |
| **2.15.02.2.05** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **1.199.507.500** | |
| 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 45.360.500 | |
| 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 61.000.000 | |
| 2.15.02.2.05.0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 16.500.000 | |
| 2.15.02.2.05.0006 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 51.997.500 | |
| 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 1.004.649.500 | |
| 2.15.02.2.05.0010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 20.000.000 | |
| **2.15.02.2.06** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **367.722.000** | |
| 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 24.440.000 | |
| 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 343.282.000 | |
| **2.15.02.2.07** | **Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** | **59.199.000** | |
| 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | 20.158.000 | |
| 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | 39.041.000 | |
| **2.15.02.2.08** | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** | **110.049.900** | |
| 2.15.02.2.08.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 33.409.800 | |
| 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 52.120.100 | |
| 2.15.02.2.08.0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 13.320.000 | |
| 2.15.02.2.08.0009 | Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana | 11.200.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | | |
| **2.15.02.2.09** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **5.921.578.750** | |
| 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 5.669.050.000 | |
| 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 252.528.750 | |
| **2.15.02.2.10** | **Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **495.270.000** | |
| 2.15.02.2.10.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 495.270.000 | |
| **2.15.02.2.11** | **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **140.542.100** | |
| 2.15.02.2.11.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | |
| 2.15.02.2.11.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | |
| 2.15.02.2.11.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 140.542.100 | |
| **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | **16.129.550.580** | |
| **2.16.2.20.2.21.05.0000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | **16.129.550.580** | |
| **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.651.112.920** | |
| **2.16.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **140.316.600** | |
| 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 114.974.800 | |
| 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.341.800 | |
| **2.16.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.809.466.140** | |
| 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.788.836.140 | |
| 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | 20.630.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | |
| **2.16.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **20.942.180** | |
| 2.16.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 20.942.180 | |
| **2.16.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **343.216.000** | |
| 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 21.600.000 | |
| 2.16.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 167.726.000 | |
| 2.16.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 153.890.000 | |
| **2.16.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **304.406.000** | |
| 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 54.662.000 | |
| 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 55.641.000 | |
| 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 19.244.000 | |
| 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 174.859.000 | |
| **2.16.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **600.000.000** | |
| 2.16.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 600.000.000 | |
| **2.16.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **158.019.000** | |
| 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60.000.000 | |
| 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3.800.000 | |
| 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 94.219.000 | |
| **2.16.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **274.747.000** | |
| 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 150.022.000 | |
| 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 95.475.000 | |
| 2.16.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 29.250.000 | |
| **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **3.936.642.600** | |
| **2.16.02.2.01** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **3.936.642.600** | |
| 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | 2.924.001.600 | |
| 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | 803.020.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten | 209.621.000 | |
| **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **4.541.795.060** | |
| **2.16.03.2.02** | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **4.541.795.060** | |
| 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda | 293.663.700 | |
| 2.16.03.2.02.0016 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | 695.350.150 | |
| 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 521.481.000 | |
| 2.16.03.2.02.0021 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | 15.807.000 | |
| 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 2.863.703.310 | |
| 2.16.03.2.02.0027 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas | 151.789.900 | |
| **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | **15.314.831.910** | |
| **3.30.2.17.3.31.07.0000** | **Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian** | **15.314.831.910** | |
| **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **11.578.831.910** | |
| **2.17.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **119.000.000** | |
| 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.000.000 | |
| 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 110.000.000 | |
| **2.17.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.702.731.210** | |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.646.731.210 | |
| 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.000.000 | |
| 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 47.000.000 | |
| **2.17.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **33.000.000** | |
| 2.17.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 33.000.000 | |
| **2.17.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **153.600.000** | |
| 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 30.600.000 | |
| 2.17.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 123.000.000 | |
| **2.17.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **455.450.700** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14.980.000 | |
| 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 47.968.800 | |
| 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.500.000 | |
| 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 109.000.000 | |
| 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 110.000.900 | |
| 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 170.001.000 | |
| **2.17.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **616.154.000** | |
| 2.17.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| **2.17.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **168.063.000** | |
| 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.000.000 | |
| 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 156.063.000 | |
| **2.17.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **330.833.000** | |
| 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 257.110.000 | |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 73.723.000 | |
| **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **80.000.000** | |
| **2.17.03.2.01** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **80.000.000** | |
| 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 30.000.000 | |
| 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | |
| **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **255.000.000** | |
| **2.17.04.2.01** | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **255.000.000** | |
| 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 5.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | 250.000.000 | |
| **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **200.000.000** | |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000 | |
| 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 200.000.000 | |
| **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **371.000.000** | |
| **2.17.06.2.01** | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **371.000.000** | |
| 2.17.06.2.01.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 31.000.000 | |
| 2.17.06.2.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | 340.000.000 | |
| **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **1.980.000.000** | |
| **2.17.07.2.01** | **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **1.980.000.000** | |
| 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | 60.000.000 | |
| 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 250.000.000 | |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 552.500.000 | |
| 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 57.500.000 | |
| 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | 260.000.000 | |
| 2.17.07.2.01.0008 | Pemulihan Usaha Mikro | 500.000.000 | |
| 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | 300.000.000 | |
| **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **850.000.000** | |
| **2.17.08.2.01** | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | **850.000.000** | |
| 2.17.08.2.01.0002 | Pengembangan Usaha Mikro | 650.000.000 | |
| 2.17.08.2.01.0005 | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | 200.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **23.099.531.092** | |
| **2.18.0.00.0.00.23.0000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | **23.099.531.092** | |
| **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **19.586.289.392** | |
| **2.18.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **142.163.400** | |
| 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 81.283.000 | |
| 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 60.880.400 | |
| **2.18.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.395.626.230** | |
| 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.392.158.030 | |
| 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.854.900 | |
| 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.613.300 | |
| **2.18.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **5.520.000** | |
| 2.18.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 5.520.000 | |
| **2.18.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **377.902.000** | |
| 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 162.720.000 | |
| 2.18.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 215.182.000 | |
| **2.18.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.292.325.000** | |
| 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 332.728.400 | |
| 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 46.976.000 | |
| 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 268.380.000 | |
| 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 205.221.600 | |
| 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 219.780.000 | |
| 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 219.239.000 | |
| **2.18.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.100.154.000** | |
| 2.18.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 646.154.000 | |
| 2.18.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 454.000.000 | |
| **2.18.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **6.313.639.016** | |
| 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 18.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.229.338.756 | |
| 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.066.300.260 | |
| **2.18.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.958.959.746** | |
| 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 165.660.000 | |
| 2.18.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.793.299.746 | |
| **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **524.620.000** | |
| **2.18.02.2.01** | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **325.515.000** | |
| 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 217.095.000 | |
| 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 108.420.000 | |
| **2.18.02.2.02** | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** | **199.105.000** | |
| 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 199.105.000 | |
| **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **586.098.400** | |
| **2.18.03.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **586.098.400** | |
| 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 586.098.400 | |
| **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **1.287.523.300** | |
| **2.18.04.2.01** | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **1.287.523.300** | |
| 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 342.240.000 | |
| 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 380.438.800 | |
| 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | 318.120.500 | |
| 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | 246.724.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **365.000.000** | |
| **2.18.05.2.01** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **365.000.000** | |
| 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 100.000.000 | |
| 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | 190.000.000 | |
| 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | 75.000.000 | |
| **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **750.000.000** | |
| **2.18.06.2.01** | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **750.000.000** | |
| 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 750.000.000 | |
| **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | **29.295.609.019** | |
| **2.22.3.26.2.19.04.0000** | **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga** | **29.295.609.019** | |
| **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **9.123.658.293** | |
| **2.19.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **493.678.628** | |
| 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 343.360.628 | |
| 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16.220.000 | |
| 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 134.098.000 | |
| **2.19.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.135.311.094** | |
| 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.992.611.116 | |
| 2.19.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 96.384.128 | |
| 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - | |
| 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 19.628.000 | |
| 2.19.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - | |
| 2.19.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 26.687.850 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.19.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **6.090.000** | |
| 2.19.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - | |
| 2.19.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6.090.000 | |
| 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 200.766.700 | |
| 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 25.653.000 | |
| 2.19.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 51.989.700 | |
| 2.19.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 123.124.000 | |
| **2.19.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **599.058.500** | |
| 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 51.770.000 | |
| 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 76.493.500 | |
| 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16.956.000 | |
| 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 51.900.000 | |
| 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 85.000.000 | |
| 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.000.000 | |
| 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 13.020.000 | |
| 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 185.829.000 | |
| 2.19.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 106.090.000 | |
| **2.19.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **622.533.950** | |
| 2.19.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 5.380.000 | |
| 2.19.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 999.950 | |
| **2.19.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **517.230.249** | |
| 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11.989.800 | |
| 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 489.448.599 | |
| 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.791.850 | |
| **2.19.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.548.989.172** | |
| 2.19.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | 40.330.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | |
| 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 289.358.844 | |
| 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 35.080.000 | |
| 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | |
| 2.19.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.184.220.328 | |
| **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **1.720.000.000** | |
| **2.19.02.2.01** | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **719.078.200** | |
| 2.19.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | - | |
| 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | 82.000.000 | |
| 2.19.02.2.01.0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | - | |
| 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota | 436.000.000 | |
| 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | 63.000.000 | |
| 2.19.02.2.01.0016 | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota | 138.078.200 | |
| **2.19.02.2.02** | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.000.921.800** | |
| 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | 1.000.921.800 | |
| 2.19.02.2.02.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan | - | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | | |
| **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **18.201.950.726** | |
| **2.19.03.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **4.256.900.000** | |
| 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota | 4.256.900.000 | |
| **2.19.03.2.02** | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **11.843.119.950** | |
| 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 350.000.000 | |
| 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | 11.493.119.950 | |
| **2.19.03.2.03** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi** | **901.930.776** | |
| 2.19.03.2.03.0006 | Seleksi Atlet Daerah | 250.000.000 | |
| 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | 300.000.000 | |
| 2.19.03.2.03.0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | 351.930.776 | |
| **2.19.03.2.05** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | **1.200.000.000** | |
| 2.19.03.2.05.0006 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi | 500.000.000 | |
| 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | 700.000.000 | |
| **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **250.000.000** | |
| **2.19.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **250.000.000** | |
| 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah | 250.000.000 | |
| **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | **466.565.750** | |
| **2.16.2.20.2.21.05.0000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | **466.565.750** | |
| **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **466.565.750** | |
| **2.20.02.2.01** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **466.565.750** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.20.02.2.01.0007 | Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | 71.332.000 | |
| 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | 395.233.750 | |
| **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | **689.154.000** | |
| 2.16.2.20.2.21.05.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 689.154.000 | |
| **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **689.154.000** | |
| **2.21.02.2.01** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **468.304.000** | |
| 2.21.02.2.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 171.534.000 | |
| 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 296.770.000 | |
| **2.21.02.2.02** | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **220.850.000** | |
| 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 220.850.000 | |
| **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | **3.424.901.991** | |
| **2.22.3.26.2.19.04.0000** | **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga** | **3.424.901.991** | |
| **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **2.415.000.000** | |
| **2.22.02.2.01** | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **965.000.000** | |
| 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | 365.000.000 | |
| 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 600.000.000 | |
| **2.22.02.2.02** | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **1.450.000.000** | |
| 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | 1.000.000.000 | |
| 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 200.000.000 | |
| 2.22.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 250.000.000 | |
| **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **275.000.000** | |
| **2.22.03.2.01** | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **275.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 100.000.000 | |
| 2.22.03.2.01.0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | 75.000.000 | |
| 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | 100.000.000 | |
| **2.22.04** | **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH** | **-** | |
| **2.22.04.2.01** | **Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **-** | |
| 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | - | |
| **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **734.901.991** | |
| **2.22.05.2.01** | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **210.000.000** | |
| 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | 60.000.000 | |
| 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya | 150.000.000 | |
| **2.22.05.2.02** | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **524.901.991** | |
| 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | 524.901.991 | |
| **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | **1.960.207.250** | |
| **2.24.2.23.0.00.01.0000** | **Dinas Arsip Daerah** | **1.960.207.250** | |
| **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **1.960.207.250** | |
| **2.23.02.2.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.710.207.250** | |
| 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.225.856.250 | |
| 2.23.02.2.01.0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 40.000.000 | |
| 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | 444.351.000 | |
| **2.23.02.2.02** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **250.000.000** | |
| 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 100.000.000 | |
| 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 150.000.000 | |
| **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | **8.309.458.391** | |
| **2.24.2.23.0.00.01.0000** | **Dinas Arsip Daerah** | **8.309.458.391** | |
| **2.24.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.509.858.191** | |
| 2.24.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 123.280.000 | |
| 2.24.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 70.280.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.24.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 53.000.000 | |
| **2.24.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.550.890.562** | |
| 2.24.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.543.528.728 | |
| 2.24.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 7.361.834 | |
| **2.24.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **-** | |
| 2.24.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - | |
| **2.24.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **128.245.700** | |
| 2.24.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 19.200.000 | |
| 2.24.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 40.811.700 | |
| 2.24.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 68.234.000 | |
| **2.24.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **320.097.000** | |
| 2.24.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 70.002.000 | |
| 2.24.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 34.292.000 | |
| 2.24.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000 | |
| 2.24.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 190.226.000 | |
| 2.24.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 10.577.000 | |
| **2.24.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **924.532.100** | |
| 2.24.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 600.000.000 | |
| 2.24.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 224.532.100 | |
| 2.24.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 100.000.000 | |
| **2.24.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **257.623.029** | |
| 2.24.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20.351.000 | |
| 2.24.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 237.272.029 | |
| **2.24.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **205.189.800** | |
| 2.24.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 117.560.000 | |
| 2.24.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.629.800 | |
| 2.24.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 50.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.24.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20.000.000 | |
| **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **799.600.200** | |
| **2.24.02.2.01** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **113.196.000** | |
| 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 113.196.000 | |
| **2.24.02.2.02** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **344.980.000** | |
| 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 344.980.000 | |
| **2.24.02.2.03** | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **341.424.200** | |
| 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 341.424.200 | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | **19.565.168.160** | |
| **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **951.008.220** | |
| **2.09.3.27.3.25.02.0000** | **Dinas Pangan dan Pertanian** | **951.008.220** | |
| **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **820.704.920** | |
| **3.25.04.2.02** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **245.000.000** | |
| 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 245.000.000 | |
| **3.25.04.2.04** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **575.704.920** | |
| 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4.999.750 | |
| 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 570.705.170 | |
| **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **130.303.300** | |
| **3.25.06.2.02** | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil** | **130.303.300** | |
| 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 130.303.300 | |
| **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | **4.611.598.990** | |
| **2.22.3.26.2.19.04.0000** | **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga** | **4.611.598.990** | |
| **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **2.221.051.148** | |
| **3.26.02.2.03** | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **2.125.051.148** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1.700.000.000 | |
| 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 425.051.148 | |
| **3.26.02.2.04** | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** | **96.000.000** | |
| 3.26.02.2.04.0009 | Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota | 50.000.000 | |
| 3.26.02.2.04.0011 | Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota | 46.000.000 | |
| **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **293.481.842** | |
| **3.26.03.2.01** | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **293.481.842** | |
| 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 70.000.000 | |
| 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | - | |
| 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 168.481.842 | |
| 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 55.000.000 | |
| **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **2.097.066.000** | |
| **3.26.05.2.01** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **2.097.066.000** | |
| 3.26.05.2.01.0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 817.066.000 | |
| 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 150.000.000 | |
| 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | 1.130.000.000 | |
| **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | **3.100.303.860** | |
| **2.09.3.27.3.25.02.0000** | **Dinas Pangan dan Pertanian** | **3.100.303.860** | |
| **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **50.000.000** | |
| **3.27.03.2.01** | **Pengembangan Prasarana Pertanian** | **50.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | 50.000.000 | |
| **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **1.216.070.978** | |
| **3.27.04.2.01** | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota** | **301.557.444** | |
| 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 301.557.444 | |
| **3.27.04.2.02** | **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota** | **51.809.000** | |
| 3.27.04.2.02.0006 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | 51.809.000 | |
| **3.27.04.2.03** | **Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **862.704.534** | |
| 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 862.704.534 | |
| **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **9.381.700** | |
| **3.27.06.2.01** | **Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **9.381.700** | |
| 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | 9.381.700 | |
| **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **1.824.851.182** | |
| **3.27.07.2.01** | **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** | **1.824.851.182** | |
| 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 102.000.000 | |
| 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 1.722.851.182 | |
| **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | **5.869.823.982** | |
| **3.30.2.17.3.31.07.0000** | **Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian** | **5.869.823.982** | |
| **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **30.000.000** | |
| **3.30.02.2.02** | **Penerbitan Tanda Daftar Gudang** | **30.000.000** | |
| 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | 30.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **4.344.823.982** | |
| **3.30.03.2.01** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **4.144.823.982** | |
| 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 430.185.982 | |
| 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 3.714.638.000 | |
| **3.30.03.2.02** | **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | **200.000.000** | |
| 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 100.000.000 | |
| 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 100.000.000 | |
| **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **448.682.000** | |
| **3.30.04.2.01** | **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota** | **20.000.000** | |
| 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 7.000.000 | |
| 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 13.000.000 | |
| **3.30.04.2.02** | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **428.682.000** | |
| 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 55.100.000 | |
| 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 122.425.000 | |
| 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 251.157.000 | |
| **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **275.636.000** | |
| **3.30.05.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **275.636.000** | |
| 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | 143.181.000 | |
| 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | 132.455.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **470.000.000** | |
| **3.30.06.2.01** | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **470.000.000** | |
| 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 400.000.000 | |
| 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | 50.000.000 | |
| 3.30.06.2.01.0003 | Penyidikan Metrologi Legal | 20.000.000 | |
| **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **300.682.000** | |
| **3.30.07.2.01** | **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** | **300.682.000** | |
| 3.30.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 93.170.000 | |
| 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 96.320.000 | |
| 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 111.192.000 | |
| **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | **4.945.091.108** | |
| **3.30.2.17.3.31.07.0000** | **Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian** | **4.945.091.108** | |
| **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **4.743.091.108** | |
| **3.31.02.2.01** | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | **4.743.091.108** | |
| 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 45.000.000 | |
| 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 4.348.091.108 | |
| 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 300.000.000 | |
| 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 50.000.000 | |
| **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **30.000.000** | |
| **3.31.03.2.01** | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | **30.000.000** | |
| 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem | 30.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | |
| **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **172.000.000** | |
| **3.31.04.2.01** | **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | **172.000.000** | |
| 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | 172.000.000 | |
| **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | **87.342.000** | |
| **2.07.3.32.0.00.01.0000** | **Dinas Tenaga Kerja** | **87.342.000** | |
| **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **87.342.000** | |
| **3.32.03.2.01** | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **87.342.000** | |
| 3.32.03.2.01.0005 | Penyuluhan Transmigrasi | 87.342.000 | |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | **192.966.470.786** | |
| **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | **89.908.982.179** | |
| **4.01.0.00.0.00.01.0000** | **Sekretariat Daerah** | **89.908.982.179** | |
| **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **79.036.071.529** | |
| **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **282.965.550** | |
| 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 230.374.900 | |
| 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6.770.000 | |
| 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.770.000 | |
| 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 10.326.600 | |
| 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 10.091.400 | |
| 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.700.000 | |
| 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.932.650 | |
| **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **34.380.716.273** | |
| 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 34.159.853.573 | |
| 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 13.468.300 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 207.394.400 | |
| **4.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **285.000.000** | |
| 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 35.000.000 | |
| 4.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 250.000.000 | |
| **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **7.752.311.742** | |
| 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 201.952.744 | |
| 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.255.023.398 | |
| 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 157.533.000 | |
| 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.159.373.700 | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 314.550.000 | |
| 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 65.600.000 | |
| 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.290.990.000 | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 307.288.900 | |
| **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **12.867.360.000** | |
| 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 11.150.000.000 | |
| 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 423.460.000 | |
| 4.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.293.900.000 | |
| **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **6.690.961.945** | |
| 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 825.000.000 | |
| 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.878.000.000 | |
| 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.175.961.945 | |
| 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.812.000.000 | |
| **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **7.012.276.222** | |
| 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 491.493.000 | |
| 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.414.948.340 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 17.325.000 | |
| 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 220.900.000 | |
| 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4.439.169.882 | |
| 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 428.440.000 | |
| **4.01.01.2.11** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **1.851.335.000** | |
| 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1.629.635.000 | |
| 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 221.700.000 | |
| **4.01.01.2.12** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **2.652.622.660** | |
| 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 1.057.538.980 | |
| 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 895.315.000 | |
| 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 699.768.680 | |
| **4.01.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **801.072.300** | |
| 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 293.449.000 | |
| 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 285.423.550 | |
| 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 222.199.750 | |
| **4.01.01.2.14** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **4.459.449.837** | |
| 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | 2.871.767.500 | |
| 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 181.683.250 | |
| 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 1.405.999.087 | |
| **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **8.124.059.500** | |
| **4.01.02.2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **1.472.039.000** | |
| 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | 646.031.000 | |
| 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 494.783.000 | |
| 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 331.225.000 | |
| **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **5.466.839.000** | |
| 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 5.081.588.300 | |
| 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | 196.920.150 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 188.330.550 | |
| **4.01.02.2.03** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **909.666.550** | |
| 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 125.462.300 | |
| 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 443.523.300 | |
| 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum | 340.680.950 | |
| **4.01.02.2.04** | **Fasilitasi Kerja Sama Daerah** | **275.514.950** | |
| 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 215.633.000 | |
| 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 59.881.950 | |
| **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **2.748.851.150** | |
| **4.01.03.2.01** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **1.298.358.000** | |
| 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 873.566.000 | |
| 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 346.850.000 | |
| 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 77.942.000 | |
| **4.01.03.2.02** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **669.055.850** | |
| 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 330.713.550 | |
| 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 338.342.300 | |
| **4.01.03.2.03** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **781.437.300** | |
| 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 297.156.400 | |
| 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 125.678.100 | |
| 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 358.602.800 | |
| **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | **103.057.488.607** | |
| **4.02.0.00.0.00.01.0000** | **Sekretariat DPRD** | **103.057.488.607** | |
| **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **88.727.995.306** | |
| **4.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **495.187.108** | |
| 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 247.008.658 | |
| 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | |
| 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 248.178.450 | |
| **4.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **7.583.837.152** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.427.837.152 | |
| 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 78.000.000 | |
| 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 78.000.000 | |
| **4.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **17.419.750** | |
| 4.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 17.419.750 | |
| **4.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **332.496.000** | |
| 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 21.000.000 | |
| 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 311.496.000 | |
| **4.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **842.071.050** | |
| 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.020.000 | |
| 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 39.295.000 | |
| 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 37.143.000 | |
| 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 163.090.800 | |
| 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 214.328.250 | |
| 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 200.000.000 | |
| 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 148.194.000 | |
| **4.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **850.000.000** | |
| 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 600.000.000 | |
| 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 100.000.000 | |
| 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50.000.000 | |
| 4.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.000.000 | |
| **4.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.364.179.700** | |
| 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 619.015.300 | |
| 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 432.002.400 | |
| 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.313.162.000 | |
| **4.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.058.324.850** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 124.950.000 | |
| 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 179.875.200 | |
| 4.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 753.499.650 | |
| **4.02.01.2.15** | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **42.775.365.596** | |
| 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 42.131.965.596 | |
| 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 547.200.000 | |
| 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 96.200.000 | |
| **4.02.01.2.16** | **Layanan Administrasi DPRD** | **32.409.114.100** | |
| 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 32.409.114.100 | |
| **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **14.329.493.301** | |
| **4.02.02.2.01** | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **772.337.100** | |
| 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah | 32.548.000 | |
| 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 292.618.900 | |
| 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 72.820.150 | |
| 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br><br>Naskah Akademik | 194.080.950 | |
| 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | 180.269.100 | |
| **4.02.02.2.02** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **569.822.000** | |
| 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | 81.398.000 | |
| 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 82.503.700 | |
| 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | 299.803.000 | |
| 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | 78.985.300 | |
| 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | 16.520.000 | |
| 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 10.612.000 | |
| **4.02.02.2.03** | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **789.711.100** | |
| 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 43.938.300 | |
| 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 44.248.300 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 44.748.300 | |
| 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 43.938.300 | |
| 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 32.298.000 | |
| 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | 580.539.900 | |
| **4.02.02.2.04** | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **6.377.329.901** | |
| 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | 1.861.757.100 | |
| 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 611.324.500 | |
| 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 954.116.301 | |
| 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | 1.798.867.500 | |
| 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 1.151.264.500 | |
| **4.02.02.2.05** | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **3.814.222.500** | |
| 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | 3.717.819.900 | |
| 4.02.02.2.05.0004 | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | 96.402.600 | |
| **4.02.02.2.06** | **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** | **52.899.000** | |
| 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 52.899.000 | |
| **4.02.02.2.07** | **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | **681.479.700** | |
| 4.02.02.2.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 681.479.700 | |
| **4.02.02.2.08** | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **1.271.692.000** | |
| 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | - | |
| 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 56.595.000 | |
| 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 1.215.097.000 | |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | **94.229.763.245** | |
| **5.01** | **PERENCANAAN** | **17.859.329.456** | |
| **5.01.5.05.0.00.01.0000** | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **17.859.329.456** | |
| **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **13.685.915.200** | |
| **5.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **400.000.000** | |
| 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 250.000.000 | |
| 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 15.000.000 | |
| 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 15.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20.000.000 | |
| 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.000.000 | |
| **5.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **11.014.753.700** | |
| 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.974.753.700 | |
| 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15.000.000 | |
| 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 25.000.000 | |
| **5.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **600.322.500** | |
| 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 42.000.000 | |
| 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 490.652.000 | |
| 5.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 33.170.500 | |
| 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 34.500.000 | |
| **5.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **553.300.000** | |
| 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.000.000 | |
| 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 81.000.000 | |
| 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.100.000 | |
| 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25.000.000 | |
| 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 282.000.000 | |
| 5.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 25.200.000 | |
| **5.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **691.154.000** | |
| 5.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 5.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 75.000.000 | |
| **5.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **116.200.000** | |
| 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 16.200.000 | |
| 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100.000.000 | |
| **5.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **310.185.000** | |
| 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 132.510.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 10.545.000 | |
| 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 47.130.000 | |
| 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 120.000.000 | |
| **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **2.241.697.864** | |
| **5.01.02.2.01** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **1.283.128.264** | |
| 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | 478.414.264 | |
| 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | 125.000.000 | |
| 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 624.714.000 | |
| 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 55.000.000 | |
| **5.01.02.2.02** | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **110.097.000** | |
| 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 85.897.000 | |
| 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 24.200.000 | |
| **5.01.02.2.03** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **594.718.600** | |
| 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 250.000.000 | |
| 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 344.718.600 | |
| **5.01.02.2.04** | **Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah** | **253.754.000** | |
| 5.01.02.2.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 88.740.000 | |
| 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 165.014.000 | |
| **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **1.931.716.392** | |
| **5.01.03.2.01** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **748.042.600** | |
| 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 300.000.000 | |
| 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | 18.251.550 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | |
| 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 20.769.750 | |
| 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 370.000.000 | |
| 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 18.251.550 | |
| 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 20.769.750 | |
| **5.01.03.2.02** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **645.000.000** | |
| 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 235.000.000 | |
| 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 55.000.000 | |
| 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 35.000.000 | |
| 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 230.000.000 | |
| 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 55.000.000 | |
| 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 35.000.000 | |
| **5.01.03.2.03** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **538.673.792** | |
| 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 182.923.064 | |
| 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 16.050.000 | |
| 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 70.427.064 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 181.736.000 | |
| 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 16.050.000 | |
| 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 71.487.664 | |
| **5.02** | **KEUANGAN** | **58.903.140.219** | |
| **5.02.0.00.0.00.02.0000** | **Badan Pengelola Pendapatan Daerah** | **19.628.969.719** | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **12.811.725.637** | |
| **5.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **137.664.100** | |
| 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 63.661.000 | |
| 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.407.000 | |
| 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.882.000 | |
| 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1.662.000 | |
| 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.977.000 | |
| 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.174.500 | |
| 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50.900.600 | |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **10.647.846.808** | |
| 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.596.902.558 | |
| 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 49.434.700 | |
| 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.509.550 | |
| **5.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **442.346.700** | |
| 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | |
| 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 249.043.700 | |
| 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 193.303.000 | |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **385.875.749** | |
| 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.529.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 73.465.800 | |
| 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 8.114.799 | |
| 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 78.113.000 | |
| 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 58.862.150 | |
| 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 11.700.000 | |
| 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 154.091.000 | |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **509.000.280** | |
| 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - | |
| 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 387.152.000 | |
| 5.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 121.848.280 | |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **219.848.000** | |
| 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 190.488.000 | |
| 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 29.360.000 | |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **469.144.000** | |
| 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 341.650.000 | |
| 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 127.494.000 | |
| **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **6.817.244.082** | |
| **5.02.04.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **6.817.244.082** | |
| 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 269.005.364 | |
| 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 145.184.100 | |
| 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 408.903.500 | |
| 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 897.720.228 | |
| 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 2.020.076.792 | |
| 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 138.555.464 | |
| 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2P) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 194.621.728 | |
| 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 236.293.800 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 172.992.106 | |
| 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | 1.302.726.300 | |
| 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 105.524.700 | |
| 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 521.749.400 | |
| 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 268.260.000 | |
| 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 135.630.600 | |
| **5.02.0.00.0.00.05.0000** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | **39.274.170.500** | |
| **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **12.328.384.450** | |
| **5.02.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **78.823.800** | |
| 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 68.535.800 | |
| 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.288.000 | |
| **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **10.267.772.350** | |
| 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.260.340.350 | |
| 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.440.000 | |
| 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.992.000 | |
| **5.02.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **61.057.000** | |
| 5.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 61.057.000 | |
| **5.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **98.240.000** | |
| 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 22.800.000 | |
| 5.02.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 75.440.000 | |
| **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **377.601.300** | |
| 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 49.043.800 | |
| 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 53.718.000 | |
| 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28.370.000 | |
| 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 165.000.000 | |
| 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 64.119.500 | |
| 5.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 17.350.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.158.154.000** | |
| 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 200.000.000 | |
| 5.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 342.000.000 | |
| **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **20.516.000** | |
| 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5.400.000 | |
| 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 15.116.000 | |
| **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **266.220.000** | |
| 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 213.390.000 | |
| 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 52.830.000 | |
| **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **23.634.523.100** | |
| **5.02.02.2.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **1.944.771.800** | |
| 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 250.059.600 | |
| 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 76.963.000 | |
| 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 473.772.400 | |
| 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 388.170.500 | |
| 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 20.726.800 | |
| 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 20.307.100 | |
| 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 97.529.200 | |
| 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 124.967.150 | |
| 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 259.247.600 | |
| 5.02.02.2.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 76.176.700 | |
| 5.02.02.2.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | 53.076.400 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 103.775.350 | |
| **5.02.02.2.02** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **539.752.600** | |
| 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 52.610.200 | |
| 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 64.997.900 | |
| 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 59.996.600 | |
| 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 32.473.700 | |
| 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 29.673.400 | |
| 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 49.995.500 | |
| 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 250.005.300 | |
| **5.02.02.2.03** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **774.998.800** | |
| 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 34.677.650 | |
| 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 392.438.300 | |
| 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 71.823.400 | |
| 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 36.441.900 | |
| 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 69.308.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.02.02.2.03.0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 61.810.100 | |
| 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 53.268.000 | |
| 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | 28.746.950 | |
| 5.02.02.2.03.0013 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | 26.484.500 | |
| **5.02.02.2.04** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **20.175.000.000** | |
| 5.02.02.2.04.0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 175.000.000 | |
| 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 20.000.000.000 | |
| **5.02.02.2.05** | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | **199.999.900** | |
| 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 199.999.900 | |
| **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **3.311.262.950** | |
| **5.02.03.2.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **3.311.262.950** | |
| 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | 276.637.700 | |
| 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 152.000.000 | |
| 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 60.500.000 | |
| 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 922.585.350 | |
| 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | 61.757.300 | |
| 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | 750.000.000 | |
| 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | 190.000.000 | |
| 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 42.200.200 | |
| 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 250.000.000 | |
| 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | 50.402.800 | |
| 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 555.179.600 | |
| **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | **13.844.243.570** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.03.5.04.0.00.02.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 13.844.243.570 | |
| **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **9.626.919.170** | |
| 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 166.322.050 | |
| 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 66.922.000 | |
| 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6.500.000 | |
| 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6.500.050 | |
| 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.500.000 | |
| 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6.500.000 | |
| 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 73.400.000 | |
| **5.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **6.952.378.000** | |
| 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.940.378.000 | |
| 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6.000.000 | |
| 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6.000.000 | |
| **5.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **9.555.000** | |
| 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9.555.000 | |
| **5.03.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **253.636.000** | |
| 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 75.933.000 | |
| 5.03.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 57.553.000 | |
| 5.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 120.150.000 | |
| **5.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **591.300.000** | |
| 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.000.000 | |
| 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 120.000.000 | |
| 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 45.000.000 | |
| 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100.000.000 | |
| 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.000.000 | |
| 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 202.300.000 | |
| 5.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **5.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.485.875.000** | |
| 5.03.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 600.000.000 | |
| 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 825.875.000 | |
| 5.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60.000.000 | |
| **5.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **22.335.000** | |
| 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6.000.000 | |
| 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16.335.000 | |
| **5.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **145.518.120** | |
| 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 85.128.120 | |
| 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 60.390.000 | |
| **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **4.217.324.400** | |
| **5.03.02.2.01** | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **2.426.051.850** | |
| 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 17.999.950 | |
| 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | 664.999.800 | |
| 5.03.02.2.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | 9.999.950 | |
| 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br><br>Pemberhentian | 1.001.969.200 | |
| 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 492.597.950 | |
| 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | 161.485.000 | |
| 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | 77.000.000 | |
| 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | 850.250.000 | |
| 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | 200.000.000 | |
| 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 70.000.000 | |
| 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | 580.250.000 | |
| **5.03.02.2.03** | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **409.999.950** | |
| 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | 249.999.950 | |
| 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 90.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.03.02.2.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | 70.000.000 | |
| **5.03.02.2.04** | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **531.022.600** | |
| 5.03.02.2.04.0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 44.999.950 | |
| 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | 148.015.000 | |
| 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | 37.507.650 | |
| 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | 255.500.000 | |
| 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 20.000.000 | |
| 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | 25.000.000 | |
| **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | **2.125.050.000** | |
| **5.03.5.04.0.00.02.0000** | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah** | **2.125.050.000** | |
| **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **2.125.050.000** | |
| **5.04.02.2.01** | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | **630.050.000** | |
| 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 280.000.000 | |
| 5.04.02.2.01.0004 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 350.050.000 | |
| **5.04.02.2.02** | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | **1.495.000.000** | |
| 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 245.000.000 | |
| 5.04.02.2.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 1.250.000.000 | |
| **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | **1.498.000.000** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1.498.000.000 | |
| **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **1.498.000.000** | |
| **5.05.02.2.01** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | **280.000.000** | |
| 5.05.02.2.01.0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 35.000.000 | |
| 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 245.000.000 | |
| **5.05.02.2.02** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | **155.000.000** | |
| 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 80.000.000 | |
| 5.05.02.2.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 25.000.000 | |
| 5.05.02.2.02.0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 25.000.000 | |
| 5.05.02.2.02.0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 25.000.000 | |
| **5.05.02.2.03** | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | **163.000.000** | |
| 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 25.000.000 | |
| 5.05.02.2.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 35.000.000 | |
| 5.05.02.2.03.0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 35.000.000 | |
| 5.05.02.2.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 35.000.000 | |
| 5.05.02.2.03.0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | 33.000.000 | |
| **5.05.02.2.04** | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **900.000.000** | |
| 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 50.000.000 | |
| 5.05.02.2.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 40.000.000 | |
| 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 749.500.000 | |
| 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 43.500.000 | |
| 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 17.000.000 | |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | **17.341.006.238** | |
| **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | **17.341.006.238** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **6.01.0.00.0.00.01.0000** | **Inspektorat** | **17.341.006.238** | |
| **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **13.483.130.866** | |
| **6.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **180.373.000** | |
| 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 94.593.000 | |
| 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 85.780.000 | |
| **6.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **9.543.057.546** | |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.528.959.546 | |
| 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7.260.000 | |
| 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6.838.000 | |
| **6.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **1.958.404.000** | |
| 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 45.000.000 | |
| 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1.663.449.000 | |
| 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 249.955.000 | |
| **6.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **453.801.680** | |
| 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 153.632.750 | |
| 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 74.569.000 | |
| 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 73.900.930 | |
| 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 132.281.000 | |
| 6.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 19.418.000 | |
| **6.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **678.384.000** | |
| 6.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 11.030.000 | |
| 6.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 51.200.000 | |
| **6.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **335.638.448** | |
| 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.500.000 | |
| 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 285.138.448 | |
| **6.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **333.472.192** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 145.312.064 | |
| 6.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 5.940.000 | |
| 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 119.924.128 | |
| 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 62.296.000 | |
| **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **1.742.819.372** | |
| **6.01.02.2.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **1.388.947.308** | |
| 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 428.022.308 | |
| 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 166.040.000 | |
| 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | 211.360.000 | |
| 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | 148.145.000 | |
| 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 435.380.000 | |
| **6.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **353.872.064** | |
| 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 143.050.064 | |
| 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 210.822.000 | |
| **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **2.115.056.000** | |
| **6.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | **251.712.000** | |
| 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 251.712.000 | |
| **6.01.03.2.02** | **Pendampingan dan Asistensi** | **1.863.344.000** | |
| 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 347.778.000 | |
| 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 768.954.000 | |
| 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 746.612.000 | |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | **113.729.846.673** | |
| **7.01** | **KECAMATAN** | **113.729.846.673** | |
| **7.01.0.00.0.00.01.0000** | **Kecamatan Cimahi Utara** | **31.918.980.100** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **14.220.895.350** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **122.769.600** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 72.774.600 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 49.995.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **10.428.173.230** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.390.673.230 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 8.500.000 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 29.000.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **201.870.000** | |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 84.000.000 | |
| 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 12.500.000 | |
| 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 105.370.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.296.174.900** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 457.762.900 | |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 342.964.000 | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 222.848.000 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 58.300.000 | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 84.400.000 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 129.900.000 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **397.179.000** | |
| 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 397.179.000 | |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | |
| 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **687.679.000** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 163.589.000 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 524.090.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.087.049.620** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 344.984.360 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 58.000.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 684.065.260 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **1.369.697.200** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **1.344.697.200** | |
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1.344.697.200 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **25.000.000** | |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 25.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **10.620.191.950** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **10.420.191.950** | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 351.355.000 | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 4.954.561.250 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5.114.275.700 | |
| **7.01.03.2.03** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **200.000.000** | |
| 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 200.000.000 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **5.325.551.850** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **5.325.551.850** | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 5.325.551.850 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **382.643.750** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **382.643.750** | |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 382.643.750 | |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | Kecamatan Cimahi Tengah | 42.160.138.784 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **20.239.220.454** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **193.800.000** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 93.700.000 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.100.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **13.982.261.154** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13.887.261.154 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 15.000.000 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 80.000.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **228.136.700** | |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 51.000.000 | |
| 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 31.200.000 | |
| 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 145.936.700 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.471.255.000** | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 657.631.000 | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 417.972.000 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 150.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 114.600.000 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 131.052.000 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.513.342.600** | |
| 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 397.179.000 | |
| 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | |
| 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100.000.000 | |
| 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.016.163.600 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.992.314.800** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 310.000.000 | |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.682.314.800 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **858.110.200** | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 641.445.200 | |
| 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | 46.035.000 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 170.630.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **370.959.000** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **295.719.000** | |
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 295.719.000 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **75.240.000** | |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 75.240.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **14.662.483.730** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **14.389.743.930** | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 589.502.650 | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 6.754.994.000 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 7.045.247.280 | |
| **7.01.03.2.03** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan** | **272.739.800** | |
| 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 272.739.800 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **6.088.479.850** | |
| **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **6.088.479.850** | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 6.088.479.850 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **798.995.750** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **798.995.750** | |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta | 798.995.750 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | |
| **7.01.0.00.0.00.03.0000** | **Kecamatan Cimahi Selatan** | **39.650.727.789** | |
| **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **18.542.427.689** | |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **111.451.000** | |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 67.822.000 | |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 43.629.000 | |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **12.973.260.069** | |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.952.543.069 | |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 9.200.000 | |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 11.517.000 | |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **171.882.000** | |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 51.000.000 | |
| 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 10.000.000 | |
| 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 110.882.000 | |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.352.592.000** | |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 14.952.000 | |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 743.850.000 | |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 325.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.780.000 | |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 103.000.000 | |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 125.010.000 | |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.720.484.000** | |
| 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 397.179.000 | |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 123.305.000 | |
| 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.200.000.000 | |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **713.918.600** | |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 234.696.600 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 479.222.000 | |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1.498.840.020** | |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 574.600.020 | |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 90.000.000 | |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 834.240.000 | |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **1.012.956.400** | |
| **7.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **952.956.400** | |
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 952.956.400 | |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **60.000.000** | |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 60.000.000 | |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **13.076.889.400** | |
| **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **12.918.889.400** | |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 459.484.400 | |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 6.344.405.000 | |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 6.115.000.000 | |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 158.000.000 | |
| 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 158.000.000 | |
| **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **6.530.899.300** | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 6.530.899.300 | |
| 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 6.530.899.300 | |
| **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **487.555.000** | |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **487.555.000** | |
| 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam | 487.555.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | **19.437.548.354** | |
| **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | **19.437.548.354** | |
| **8.01.0.00.0.00.01.0000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | **19.437.548.354** | |
| **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **7.752.429.904** | |
| **8.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **125.150.500** | |
| 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 52.339.500 | |
| 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 72.811.000 | |
| **8.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **5.637.807.904** | |
| 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.637.807.904 | |
| **8.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **199.834.000** | |
| 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 68.882.000 | |
| 8.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 91.676.000 | |
| 8.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 39.276.000 | |
| **8.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **399.713.000** | |
| 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 72.032.200 | |
| 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 84.408.000 | |
| 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 68.314.800 | |
| 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 174.958.000 | |
| **8.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **807.262.900** | |
| 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 616.154.000 | |
| 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 144.908.900 | |
| 8.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 46.200.000 | |
| **8.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **261.802.000** | |
| 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2.640.000 | |
| 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 68.190.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 190.972.000 | |
| **8.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **320.859.600** | |
| 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 120.859.600 | |
| 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 | |
| **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **1.934.576.000** | |
| **8.01.02.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **1.934.576.000** | |
| 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 7.500.000 | |
| 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 867.054.500 | |
| 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1.060.021.500 | |
| **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **4.316.281.450** | |
| **8.01.03.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | **4.316.281.450** | |
| 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 5.135.950 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 2.828.000 | |
| 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 2.995.997.500 | |
| 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1.309.716.000 | |
| 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 2.604.000 | |
| **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **1.332.440.500** | |
| **8.01.04.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **1.332.440.500** | |
| 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 5.420.000 | |
| 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 3.119.750 | |
| 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1.179.346.900 | |
| 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan | 137.614.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | |
| 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 6.939.850 | |
| **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **1.091.483.500** | |
| **8.01.05.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **1.091.483.500** | |
| 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 7.020.000 | |
| 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 660.199.500 | |
| 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 424.264.000 | |
| **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **3.010.337.000** | |
| **8.01.06.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **3.010.337.000** | |
| 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 19.540.000 | |
| 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 172.600.000 | |
| 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama | 470.718.000 | |

| Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan | | Plafon Anggaran Sementara | Ket |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | |
| 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1.196.581.000 | |
| 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 24.840.000 | |
| 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 1.126.058.000 | |
| **TOTAL JUMLAH** | | **1.745.257.071.280** | |

## 4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA

Sebagaimana target Kebijakan Belanja Daerah di dalam Dokumen Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 maka plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga dapat dituangkan secara deskriptif pada tabulasi sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**
**Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga**
**Tahun Anggaran 2025**

| Kode Akun | Uraian Akun | Plafon Anggaran Sementara 2025 |
|---|---|---|
| **5** | **BELANJA** | **1.745.257.071.280** |
| 5.1 | Belanja Operasi | 1.584.125.460.893 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 749.721.360.067 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 780.952.172.542 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga | 175.000.000 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | - |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 49.503.259.500 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 3.773.668.784,00 |
| 5.2 | Belanja Modal | 141.131.610.387 |
| 5.3 | Belanja Tidak Terduga | 20.000.000.000 |

*Sumber : BPKAD (Diolah)*

Adapun rincian belanja sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.2 di atas terbagi kepada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing sehingga Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3.**
**Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja per Perangkat Daerah**
**Tahun Anggaran 2025**

| PERANGKAT DAERAH | PAGU 2025 |
|---|---|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000Dinas Pendidikan | 399.339.936.224 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000Dinas Kesehatan | 168.490.271.560 |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000RSUD CIBABAT | 200.542.924.252 |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 84.039.474.992 |
| 1.04.1.03.2.10.01.0000Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 90.811.271.733 |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 31.604.962.300 |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 11.117.180.000 |
| 1.06.1.06.0.00.06.0000Dinas Sosial | 19.173.592.790 |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000Dinas Tenaga Kerja | 15.865.041.077 |
| 2.08.2.14.2.13.01.0000Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 21.552.805.550 |
| 2.09.3.27.3.25.02.0000Dinas Pangan dan Pertanian | 18.779.417.400 |
| 2.11.1.03.0.00.02.0000Dinas Lingkungan Hidup | 73.070.738.230 |
| 2.12.0.00.0.00.02.0000Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 11.465.969.013 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000Dinas Perhubungan | 47.582.526.800 |
| 2.16.2.20.2.21.05.0000Dinas Komunikasi dan Informatika | 17.285.270.330 |
| 2.18.0.00.0.00.23.0000Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 23.099.531.092 |
| 2.22.3.26.2.19.04.0000Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | 37.332.110.000 |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000Dinas Arsip Daerah | 10.269.665.641 |
| 3.30.2.17.3.31.07.0000Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian | 26.129.747.000 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000Sekretariat Daerah | 89.908.982.179 |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000Sekretariat DPRD | 103.057.488.607 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 19.357.329.456 |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000Badan Pengelola Pendapatan Daerah | 19.628.969.719 |
| 5.02.0.00.0.00.05.0000Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 39.274.170.500 |
| 5.03.5.04.0.00.02.0000Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 15.969.293.570 |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000Inspektorat | 17.341.006.238 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000Kecamatan Cimahi Utara | 31.918.980.100 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000Kecamatan Cimahi Tengah | 42.160.138.784 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000Kecamatan Cimahi Selatan | 39.650.727.789 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 19.437.548.354 |
| **JUMLAH** | **1.745.257.071.280** |

*Sumber : BPKAD (Diolah)*

# BAB V
# RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana target kebijakan Pembiayaan Daerah di dalam Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 maka target pembiayaan daerah pada Plafon Anggaran Sementara dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 5.1**
**Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025**

| Kode Akun | Uraian Akun | Plafon Anggaran Sementara 2025 |
|---|---|---|
| **6** | **PEMBIAYAAN** | **76,210,431,094** |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 78,640,240,094 |
| 6.1.01 | SILPA | 78,640,240,094 |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan | - |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 2.429.809.000,00 |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 2.429.809.000,00 |

*Sumber : BPKAD (Diolah)*

## BAB VI

## PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati oleh oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, merupakan upaya maksimal dalam menyusun prioritas program, kegiatan dan anggaran yang merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran ini dialokasikan pada setiap program/kegiatan masing-masing sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan selanjutnya dirangkai menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan pembiayaannya.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Cimahi, 7 Agustus 2024

**Pj. WALI KOTA CIMAHI**

**selaku,**

**PIHAK PERTAMA**

**Dr. Ir. H. DICKY SAROMI M.Sc.**

**PIMPINAN**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KOTA CIMAHI**

**selaku,**

**PIHAK KEDUA**

**Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, M.T.**
**KETUA**

**H. BAMBANG PURNOMO**
**WAKIL KETUA**

**PURWANTO, S.Pd.**
**WAKIL KETUA**

**H. EDI KANEDI, S.E., M.M.Pd.**
**WAKIL KETUA**